



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

Kanwil DJKN Sumatera Selatan,
Jambi dan Bangka Belitung
Tahun 2025

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 3 |
| 1.3 Mandat | 7 |
| 1.4 Peran Strategis Kanwil DJKN SJB | 8 |
| 1.5 Wilayah Kerja dan Unit Pelaksana | 12 |
| 1.6 Sumber Daya Manusia | 15 |
| 1.7 Sarana dan Prasarana | 18 |
| 1.8 Budaya Organisasi | 21 |
| BAB II RENCANA KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis (Renstra) | 25 |
| 2.1.1 Visi DJKN 2025-2029 | 26 |
| 2.1.2 Misi DJKN | 28 |
| 2.1.3 Tujuan Strategis | 31 |
| 2.1.4 Sasaran Strategis DJKN 2025-2029 | 35 |
| 2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra | 38 |
| 2.1.6 Arah Kebijakan dan Milestone Renstra | 42 |
| 2.2 Rencana Kerja Tahun 2025 | 47 |
| 2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 & Adendum | 54 |
| 2.4 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 58 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 63 |
| 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | 65 |
| 3.3 Capaian IKU menurut Perspektif | 68 |
| 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis | 75 |
| 3.5 Analisis GEDSI-AKPM | 98 |
| 3.6 Analisis Kinerja Perbidang | 102 |
| BAB IV PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN | |
| 4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025 | 110 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 4.2 Efektivitas Anggaran | 112 |
| 4.3 Analisis Isu Tematik APBN | 115 |
| 4.4 Evaluasi dan Rekomendasi | 118 |

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan | 16 |
| Tabel 2. Daftar Rumah Dinas | 19 |
| Tabel 3. Daftar Kendaraan Dinas | 20 |
| Tabel 4. Adendum PK 2c-CP (bila dicantumkan) | 57 |
| Tabel 5. Capaian IKU 1a-CP & 1b-CP | 72 |
| Tabel 6. Capaian IKU 2a-CP, 2b-CP, 2c-CP | 78 |
| Tabel 7. Capaian IKU 3a-N, 3b-N, 3c-N | 85 |
| Tabel 8. Capaian IKU 4a-CP & 4b-N | 90 |
| Tabel 9. Capaian IKU 5a-CP, 5b-CP, 5c-CP | 95 |
| Tabel 10. Capaian IKU 6a-CP, 6b-N, 6x-N | 101 |
| Tabel 11. Capaian IKU 7a-CP & 7b-N | 103 |
| Tabel 12. Capaian IKU 8a-N | 105 |
| Tabel 13. Rekapitulasi Realisasi Anggaran | 111 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Kanwil DJKN SJB | 5 |
| Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Kanwil DJKN SJB | 14 |
| Gambar 3. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan | 16 |
| Gambar 4. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 17 |
| Gambar 5. Peta Strategis Kanwil DJKN SJB | 40 |
| Gambar 6. Bagan Perspektif Kinerja (Stakeholder, Customer, Internal, L&G.....) | 66 |
| Gambar 7. Grafik Capaian NKO | 67 |
| Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran (jika ditampilkan) | 111 |

PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Performa Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dinilai berdasarkan pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2025.

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 mencapai 115,13, yang mencerminkan kinerja organisasi yang sangat baik. Capaian ini diperkuat oleh Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 95,48, yang menunjukkan kualitas layanan publik telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pemangku kepentingan. Hasil ini menjadi landasan penguatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya..

Kami berharap penyusunan Laporan kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2025. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan

yang terus-menerus sesuai dengan moto layanan yaitu Cermat, Ikhlas, iNovatif, Disiplin dan Obyektif (CINDO) dalam memberikan layanan selaras dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Akhir kata, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung atas kontribusi, dedikasi, dan kerja sama dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja Tahun 2025.

Kepala Kanwil DJKN Sumatera
Selatan, Jambi dan Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menyajikan capaian kinerja organisasi secara ringkas, sistematis, dan komprehensif selama Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan oleh Kantor Pusat DJKN, termasuk penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini didasarkan pada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan yang memadai atas analisis capaian kinerja Tahun 2025.

Sebagai unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil DJKN berkomitmen menyelenggarakan pelayanan yang unggul dengan mengedepankan kesederhanaan prosedur, kejelasan dan kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan akses, serta sikap disiplin, sopan, ramah, dan nyaman.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung berpedoman pada visi DJKN, yaitu *“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Untuk mewujudkan visi tersebut, DJKN menetapkan enam misi, yaitu:

- (1) mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- (3) meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- (4) mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan;

- (5) melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; serta
- (6) mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menetapkan tujuan strategis berupa terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal, serta mampu membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Peta Strategi dan Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil Tahun 2025, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berupa 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2025.

Sasaran strategis pertama, yaitu *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi*, mencatat capaian Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar **124,88%** dari target Rp84,7 miliar serta capaian Indeks Integritas sebesar **94,12** sesuai target.

Sasaran strategis kedua, yaitu *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa*, menunjukkan capaian sangat baik, antara lain Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebesar **127,47**, Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN sebesar **100**, efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN sebesar **100**, realisasi pokok lelang sebesar **100%** dari target Rp1,38 triliun, serta penurunan outstanding piutang negara sebesar **137,42%** dari target Rp10 miliar.

Sasaran strategis ketiga, yaitu *Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien*, menunjukkan capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian sebesar **100**, melampaui target sebesar 75.

Sasaran strategis keempat, *Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif*, mencatat capaian sertifikasi tanah BMN sebesar **78,40%** dari target 100% dan evaluasi kinerja portofolio aset sebesar **100%** sesuai target.

Sasaran strategis kelima, *Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif*, berhasil mencapai Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara sebesar **100% (107 BKPN)** dan Persentase Produktivitas Lelang sebesar **100%**, melampaui target.

Sasaran strategis keenam, *Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional*, mencatat capaian Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar **100%**, jauh di atas target sebesar 16%.

Sasaran strategis ketujuh, *Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif*, menunjukkan capaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar **100**, Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar **100%**, serta penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi sebesar **100%**.

Sasaran strategis kedelapan, *Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel*, mencatat capaian Indeks Kinerja Anggaran sebesar **100** dan Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN sebesar **10%** sesuai target.

Sasaran strategis kesembilan, *Komunikasi Publik yang Efektif*, mencatat capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan sebesar **3,55** dan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) sebesar **100**, melampaui target.

Sasaran strategis kesepuluh, *Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah*, menunjukkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebesar **100%** serta capaian keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar **100**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas yang sangat baik serta menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kinerja dan kualitas layanan pada periode selanjutnya.

BAB. I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran negara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki peran strategis dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang guna mendukung penerimaan negara, efisiensi belanja, serta optimalisasi nilai kekayaan negara. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagai instansi vertikal DJKN bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan strategis tersebut ke dalam pelaksanaan tugas operasional di wilayah kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJKN dan Peta Strategi Kanwil Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil dan diintegrasikan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai alat ukur kinerja organisasi secara menyeluruh.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, dasar perumusan kebijakan perbaikan kinerja, serta media transparansi kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 diharapkan dapat

menjadi dasar yang objektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan publik pada periode selanjutnya.

II. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kantor wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. Pemberian bimbingan teknis penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang dan Profesi Lelang;

- i. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian pada kantor wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut :

a. Bagian Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan Barang Milik Negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- 2) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- 6) Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- 3) Penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara / Kekayaan Negara; dan d. Pengkoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

c. Bidang Piutang Negara.

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
- 5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

d. Bidang Penilaian.

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas penilai; dan
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

e. Bidang Lelang.

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan;
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang dan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;

- 4) Pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
- 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang;
- 6) Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I/Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan
- 7) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi.

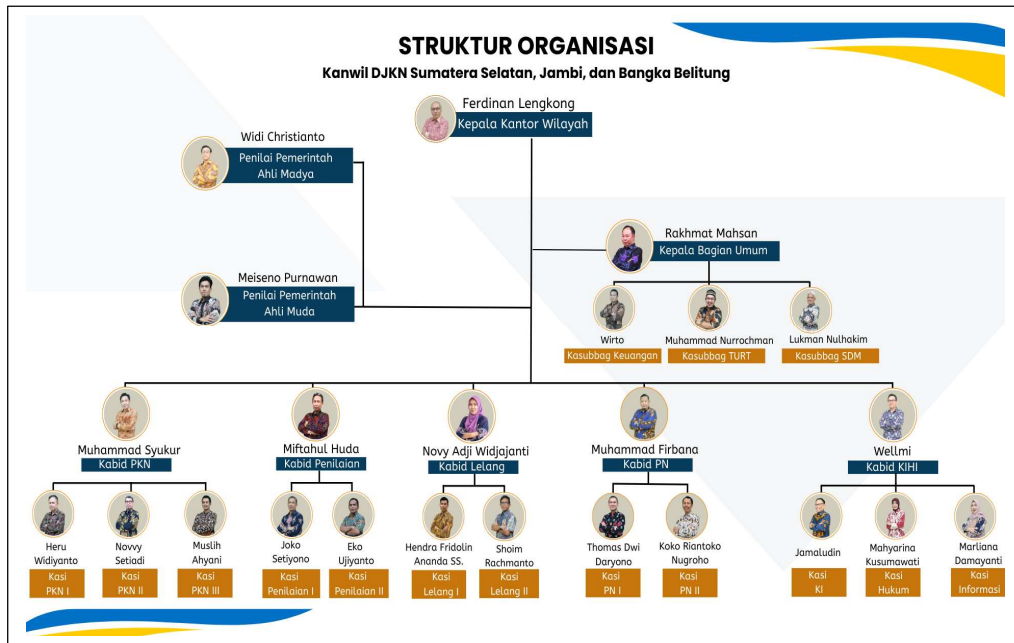
Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- 4) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;

- 5) Penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
- 7) Penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

Struktur organisasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagaimana disajikan pada bagan di bawah ini.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG

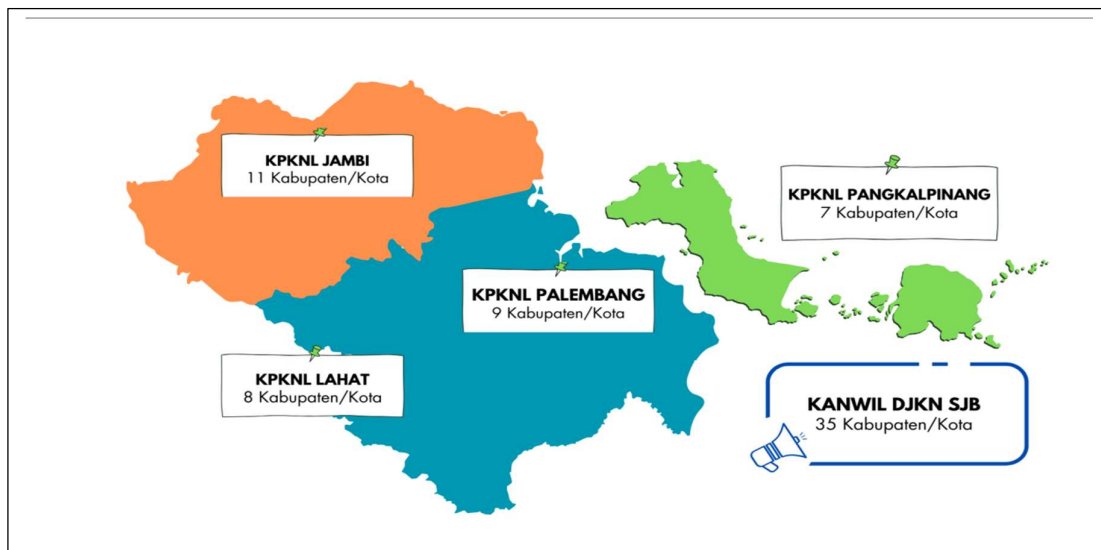


Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di tingkat operasional dilaksanakan oleh 4 Kantor Pelayanan yaitu :

1. KPKNL Jambi
2. KPKNL Palembang
3. KPKNL Lahat
4. KPKNL Pangkal Pinang

Wilayah kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi 35 Kabupaten/Kota sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 2. PETA WILAYAH KERJA KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG



Daftar Wilayah Kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi:

1. KPKNL Jambi
 - a. Kabupaten Batanghari,
 - b. Kabupaten Bungo
 - c. Kabupaten Kerinci
 - d. Kabupaten Merangin
 - e. Kabupaten Muaro Jambi
 - f. Kabupaten Sarolangun
 - g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

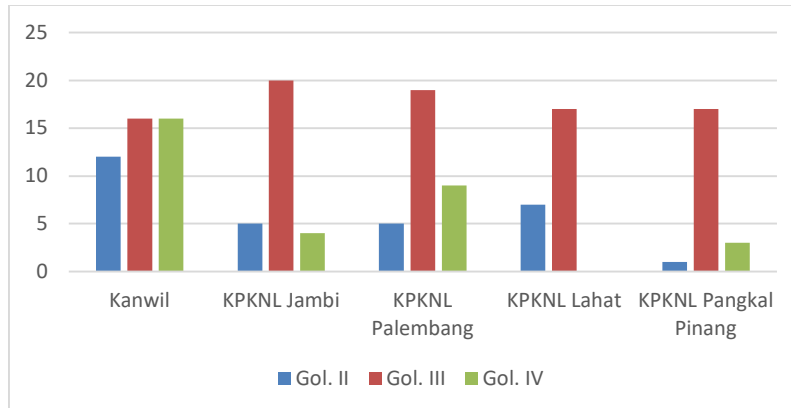
- i. Kabupaten Tebo
 - j. Kota Jambi
 - k. Kota Sungai Penuh
2. KPKNL Palembang
- a. Kota Palembang
 - b. Kota Prabumulih
 - c. Kabupaten Musi Banyuasin
 - d. Kabupaten Banyuasin
 - e. Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - f. Kabupaten Ogan Ilir
 - g. Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. KPKNL Lahat
- a. Kabupaten Lahat
 - b. Kabupaten Muara Enim
 - c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - d. Kabupaten Empat Lawang
 - e. Kabupaten Musi Rawas
 - f. Kabupaten Musi Rawas Utara
 - g. Kota Pagar Alam
 - h. Kota Lubuklinggau
4. KPKNL Pangkal Pinang
- a. Kota Pangkalpinang
 - b. Kabupaten Bangka
 - c. Kabupaten Bangka Tengah
 - d. Kabupaten Bangka Selatan
 - e. Kabupaten Belitung
 - f. Kabupaten Belitung Timur
 - g. Kabupaten Bangka Barat

Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan berupa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Fisik. Sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

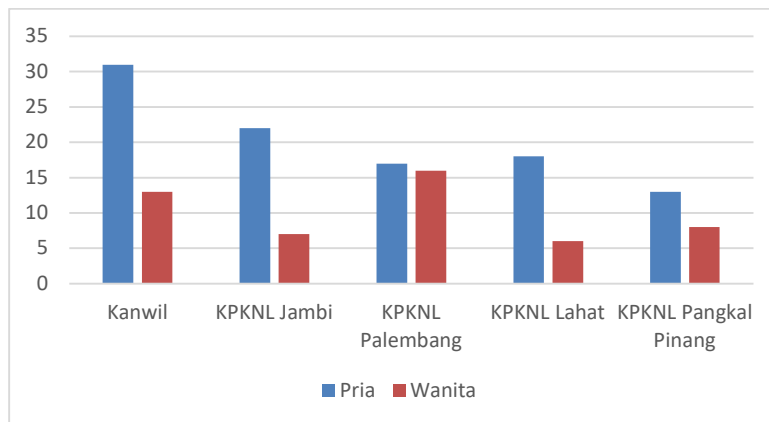
Sumber daya manusia Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung serta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada tahun 2025 sebanyak 151 pegawai, dengan komposisi berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan



Sebaran komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin



2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung disajikan sebagai berikut:

- a. Gedung menempati Gedung Keuangan Negara lantai 3, Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang. Status gedung kantor dan tanah adalah milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, di bawah pengelolaan KPTIK BMN Medan.
- b. Rumah Dinas, saat ini rumah dinas Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 2 rumah dinas yaitu :

Tabel 1. Daftar Rumah Dinas

| No | Nama Barang | Alamat | Kondisi |
|----|--|--|-------------|
| 1 | Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 95 m2. | Jl. Lunjuk Jaya, Lrg. Melati No.5558B Rt.50/14 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang | Baik |
| 2 | Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 98 m2. | Jl. May Zen, Lrg. Margoyoso No.106 Rt.08/03 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang | Rusak Berat |

Tabel 2. Daftar Kendaraan Dinas

| No | Jenis Barang | Kondisi Barang | | | Jumlah |
|----|------------------|----------------|----|----|--------|
| | | B | RR | RB | |
| 1 | Kendaraan roda 4 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Kendaraan roda 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |

III. Mandat

Mandat yang diberikan kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mencakup 3 (tiga) *core business* utama, yaitu sebagai pengelola kekayaan negara, pengurus piutang negara, serta regulator sekaligus operator lelang. Selain itu, Kanwil DJKN juga melaksanakan tugas lain yang bersifat khusus, antara lain penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN pada prinsipnya memiliki *core business* yang sejalan dengan Kantor Pusat DJKN. Dalam pelaksanaannya, sebagian kewenangan DJKN selaku unit eselon I telah dilimpahkan

kepada unit eselon di bawahnya dalam batasan tertentu, sehingga pelaksanaan mandat tersebut menjadi tanggung jawab unit kerja penerima pelimpahan kewenangan.

Adapun mandat utama yang dilimpahkan kepada Kanwil DJKN meliputi:

- a. mandat pengurusan piutang negara dalam kedudukan sebagai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. mandat sebagai superintenden lelang; dan
- c. mandat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kewenangan dan batasan yang ditetapkan.

IV. **Peran** Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja melalui fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, pengendalian, dan evaluasi terhadap KPKNL di bawahnya, sekaligus sebagai pelaksana operasional kegiatan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan. Sebagai penghubung antara kebijakan DJKN Pusat dan implementasi di tingkat operasional, Kanwil DJKN memastikan pelaksanaan kebijakan nasional berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara, penguatan tata kelola kekayaan negara, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung di bidang pengelolaan kekayaan negara diarahkan pada optimalisasi daya guna dan hasil guna kekayaan negara melalui pembinaan, penatausahaan, pengamanan aset, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari aset negara. Dalam seluruh siklus pengelolaan kekayaan negara, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, fungsi penilaian berperan dalam menyediakan informasi nilai wajar serta analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use) sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah, pada Tahun 2025 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menetapkan target sertifikasi BMN berupa tanah sebanyak 1.802 bidang. Atas target tersebut, realisasi sertifikasi

mencapai sekitar 1.827 bidang, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 101,39%, sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025.

b. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung di bidang pengurusan piutang negara dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara melalui transformasi piutang bermasalah (non-performing loan) menjadi aset negara yang lebih likuid dan berdaya guna bagi pembangunan. Pengurusan piutang negara dilakukan melalui penatausahaan, verifikasi, penagihan, dan penyelesaian berkas piutang macet yang bersumber dari instansi pemerintah dan badan usaha milik negara, berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab hukum lainnya.

Pada Tahun 2025, kinerja pengurusan piutang negara menunjukkan hasil yang sangat baik. Penurunan outstanding piutang negara mencapai Rp8,39 miliar dari target Rp4,71 miliar, atau sebesar 178,26%, mencerminkan efektivitas strategi penagihan dan penyelesaian berkas kasus piutang negara. Selain itu, penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) mencapai 112 BKPN dari target 79 BKPN, atau setara 156,96% capaian IKU, sehingga melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh penguatan pengawasan, pembenahan sistem dan administrasi, serta pemutakhiran basis data piutang negara secara berkelanjutan. Upaya tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas proses bisnis pengurusan piutang negara dan mendukung keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

c. Pelayanan Lelang

Peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung di bidang lelang diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan lelang kepada masyarakat sebagai sarana transaksi penjualan aset yang transparan, kompetitif, efisien, dan akuntabel. Pelayanan lelang dilaksanakan secara elektronik melalui kanal resmi DJKN (*e-auction*), sehingga memperluas akses masyarakat, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan keterlacakan informasi. Dalam praktiknya, risalah lelang berfungsi sebagai akta otentik (*akta van transport*) yang memberikan kepastian hukum atas peralihan hak.

Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas

layanan lelang. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Upaya kerja sama dan penandatanganan nota kesepahaman penjualan secara lelang telah dilakukan bersama para *stakeholder*, yang secara bersama telah merumuskan kesepakatan bersama dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk berperan aktif dalam memasarkan produk-produknya melalui lelang sehingga lebih dikenal dan jangkauannya lebih luas. Kinerja lelang Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas layanan dan produktivitas. Hal ini tercermin dari Indikator utama sebagai berikut:

- a. Persentase Realisasi Pokok Lelang (IKU 2b-CP) sebesar 120,77% (skor dibatasi sampai 120), dan
- b. Produktivitas Lelang (IKU 5c-CP) sebesar 135,87%, yang mencerminkan tingginya aktivitas serta efektivitas penyelenggaraan lelang dibandingkan target yang ditetapkan.

Selain itu, secara komposit penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang (IKU 1b-CP) tercapai sebesar 129,66%, yang turut merefleksikan kontribusi sektor lelang terhadap penerimaan negara.

Keunggulan layanan lelang dibandingkan transaksi jual beli konvensional tetap relevan, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, serta memberikan kepastian hukum. Ke depan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung akan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan lelang, termasuk lelang noneksekusi sukarela dan wajib, sebagai kanal pemasaran yang legal dan tepercaya, serta sebagai pengungkit aktivitas ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha/UMKM di wilayah.

Kontribusi PNBK Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 129,66% dari target yang ditetapkan. Capaian ini berasal dari tiga kelompok layanan utama DJKN, yaitu pengurusan piutang negara, layanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara.

Pertama, PNBK dari pengurusan piutang negara memberikan kontribusi melalui biaya administrasi pengurusan piutang negara (BIAD PUPN). Capaian ini

mencerminkan meningkatnya efektivitas proses penetapan dan penyelesaian piutang negara di lingkungan KPKNL yang berada di bawah Kanwil DJKN SJB.

Kedua, PNBP dari layanan lelang diperoleh dari bea lelang, hasil lelang tertentu, serta biaya administrasi balai lelang. Kinerja PNBP sektor lelang sangat kuat, seiring dengan tingginya produktivitas lelang yang mencapai 135,87% dan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat serta pemilik barang terhadap layanan lelang DJKN.

Ketiga, PNBP dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), termasuk skema sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah. Kontribusi BMN ini mengindikasikan peningkatan nilai ekonomi aset negara serta semakin efektifnya pemanfaatan aset oleh satuan kerja.

Secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut menjadi pendorong utama tercapainya realisasi PNBP Kanwil DJKN SJB yang melampaui target. Capaian ini menguatkan peran DJKN sebagai pengelola aset negara yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembiayaan negara, sekaligus mendukung pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN SJB Tahun 2025 sebesar 115,13 (kategori Sangat Baik).

V. Isu Strategis Organisasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam Kertas Kerja Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik pada seluruh sasaran strategis. Meskipun demikian, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja, meningkatkan kualitas proses bisnis, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, serta pelayanan lelang.

a. Kendala dalam Program Pensertipikatan BMN

Pelaksanaan program pensertipikatan BMN di beberapa satuan kerja masih menghadapi kendala, antara lain ketidakjelasan batas fisik tanah dan belum lengkapnya dokumen pendukung pemetaan aset. Kondisi ini berdampak pada proses verifikasi oleh KPKNL dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun demikian, capaian IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan tetap mencapai di

atas target sebagaimana tercermin dalam NKO Tahun 2025, yang menunjukkan efektivitas pembinaan dan koordinasi Kanwil terhadap satuan kerja.

- b. Ketidaksesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
Masih terdapat penggunaan BMN oleh satuan kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, termasuk ketidaksesuaian luasan aset yang digunakan. Kondisi ini mempengaruhi proses optimalisasi BMN dan memerlukan peningkatan pemahaman serta penguatan peran reuiu awal oleh satuan kerja. Walaupun demikian, indikator kinerja terkait pengelolaan BMN dan layanan penilaian tetap menunjukkan capaian yang sangat baik.
- c. Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN yang Belum Optimal
Beberapa persetujuan pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang telah diterbitkan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh satuan kerja pemilik BMN. Hal ini berpotensi menunda realisasi pemanfaatan aset dan kontribusi PNBPN dari sektor BMN. Isu ini menekankan pentingnya penguatan monitoring dan pendampingan pascapersetujuan agar manfaat ekonomi aset negara dapat segera dioptimalkan.
- d. Isu Pengurusan Piutang Negara
Dalam pengurusan piutang negara, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mencatat capaian kinerja yang sangat tinggi, terutama pada indikator penurunan saldo piutang negara dan penyelesaian berkas kasus piutang negara. Capaian ini menunjukkan efektivitas upaya penagihan, restrukturisasi, dan penyelesaian piutang sesuai ketentuan. Namun demikian, masih terdapat kendala struktural dalam penanganan kasus tertentu, antara lain debitur atau penanggung utang yang tidak dapat ditemukan, tidak kooperatif, serta objek jaminan yang sulit dilacak atau tidak memiliki nilai ekonomis memadai. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian dan menimbulkan backlog kasus yang memerlukan penanganan jangka panjang serta koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas basis data, optimalisasi kerja sama dengan instansi terkait, serta penerapan strategi pengurusan piutang negara yang lebih adaptif.
- e. Ketidakteraturan Pencatatan Data Pokok Lelang
Ditemukan adanya pokok lelang yang telah dilaksanakan dan PNBPN-nya telah masuk ke sistem OM-SPAN, namun belum seluruhnya tercatat secara tepat waktu dalam basis data pelaporan Direktorat Lelang. Kondisi ini mempengaruhi akurasi data kinerja pada tahap pelaporan, meskipun secara substantif realisasi kinerja lelang telah tercapai.

f. **Kualitas Objek Lelang yang Kurang Marketable**

Sebagian objek lelang memiliki keterbatasan dari sisi nilai pasar, kondisi fisik, atau aspek legal, yang menyebabkan tingginya jumlah lelang Tidak Ada Penawaran (TAP). Faktor ini merupakan tantangan eksternal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan lelang, meskipun indikator produktivitas lelang secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik.

g. **Optimalisasi Lelang UMKM**

Kontribusi lelang UMKM terhadap total kinerja lelang masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi pelaku UMKM terhadap mekanisme lelang serta belum optimalnya kualitas dan kesiapan objek lelang. Diperlukan strategi penguatan edukasi, pendampingan pra-lelang, dan promosi agar lelang dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis tersebut tidak mengurangi pencapaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 yang secara umum berada pada kategori sangat baik, namun menjadi dasar penting bagi penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas proses bisnis, dan penguatan keberlanjutan kinerja pada periode selanjutnya.

VI. **Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kinerja organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atas hasil yang diperoleh. Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

1. **Bab I - Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum organisasi, meliputi latar belakang penyusunan laporan, dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, mandat, wilayah kerja, serta sumber daya yang dimiliki. Bagian ini juga menjelaskan konteks strategis yang memengaruhi pelaksanaan tugas Kanwil DJKN SJB selama tahun berjalan.

2. **Bab II - Rencana Kinerja**

Bab ini menyajikan kerangka perencanaan kinerja sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja tahun 2025. Pembahasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program yang ditetapkan dalam Renstra DJKN 2025-2029; Rencana Kerja

(Renja) 2025; Peta Strategis Kanwil DJKN SJB; serta penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan arah penyusunan PK Tahun 2026.

3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian kinerja Kanwil DJKN SJB berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Analisis disusun berdasarkan empat perspektif dalam Peta Strategis DJKN: Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth. Pada bab ini juga diuraikan analisis capaian tiap sasaran strategis, termasuk capaian IKU, faktor pendukung dan hambatan, serta analisis tematik seperti integrasi GEDSI dalam pencapaian layanan.

4. Bab IV - Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Bab ini memuat uraian mengenai realisasi anggaran Tahun 2025, termasuk perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran per bidang, tingkat serapan, serta analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Bagian ini juga menjelaskan kontribusi anggaran terhadap pencapaian sasaran strategis, serta pemanfaatan anggaran dalam mendukung isu prioritas APBN seperti UMKM, Zona Integritas, kehumasan, edukasi publik, dan layanan hukum.

Bab V - Penutup

Bab ini menyampaikan kesimpulan keseluruhan atas capaian kinerja Kanwil DJKN SJB Tahun 2025 serta rekomendasi umum untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Bagian ini menegaskan komitmen organisasi dalam terus meningkatkan akuntabilitas, kualitas layanan, serta efektivitas program pembinaan dan operasional di wilayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan terkoordinasi, serta mengikuti alur pemikiran yang sistematis. Perencanaan strategis dirumuskan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin dihadapi. Dalam konteks tersebut, Rencana Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja yang realistis, adaptif, serta mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis guna mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan dan dapat dicapai.

1. Visi

Merupakan landasan utama dalam perencanaan strategis yang menggambarkan arah, cita-cita, dan kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung berpedoman pada visi dan misi DJKN dengan memperhatikan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut, visi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.”

2. Misi

Sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung berpedoman pada misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Misi tersebut menjadi arah pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis DJKN dan Kementerian Keuangan.

Adapun misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- f. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi dan misi tersebut menjadi landasan dan “napas” Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Seluruh jajaran organisasi diharapkan senantiasa meningkatkan profesionalisme, bekerja secara efektif, efisien, dan transparan, serta menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat, guna mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.

3. Tujuan

Dalam rangka mengimplementasikan misi serta memberikan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menetapkan tujuan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penetapan tujuan ini berorientasi pada peningkatan kinerja pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal, serta mampu membangun kepercayaan dan citra positif di mata pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang akuntabel, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian sasaran strategis DJKN dan Kementerian Keuangan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan arah tujuan operasional sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penertiban dan peningkatan kualitas administrasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan;
- c. Mendukung pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, lelang, serta administrasi umum;
- d. Menyediakan data dan informasi kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang andal dan terintegrasi;
- e. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- f. Memberikan dukungan advokasi dan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

4. Sasaran dan Perjanjian Kinerja

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara terukur oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Sasaran strategis disusun untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja dapat diukur secara periodik melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan selaras dengan Peta Strategi DJKN serta Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan peran strategis Kanwil DJKN, sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi;
- b. Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
- c. Terwujudnya layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien;
- d. Terwujudnya penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;
- e. Terwujudnya penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif;
- f. Terwujudnya pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
- g. Terwujudnya pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang adaptif;
- h. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- i. Terwujudnya komunikasi publik dan pengelolaan layanan informasi yang efektif;
- j. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Sasaran strategis tersebut menjadi dasar penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil.

2. Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan tata kelola pengelolaan kekayaan negara, melalui tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN), peningkatan kualitas penatausahaan, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan dan satuan kerja lainnya dalam wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung;

- b. Peningkatan tertib administrasi dan kepatuhan organisasi, melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan di bidang kepegawaian, manajemen kinerja, dan manajemen risiko;
- c. Optimalisasi pengurusan piutang negara, melalui peningkatan kualitas administrasi piutang, pemutakhiran basis data, serta peningkatan realisasi penyelesaian piutang negara secara efektif dan akuntabel;
- d. Penguatan pengendalian dan pemantauan berkas piutang negara, termasuk pemetaan kondisi berkas lengkap, tidak lengkap, dan tidak diketahui keberadaannya, guna mendukung percepatan penyelesaian piutang negara;
- e. Peningkatan kinerja pelayanan lelang, melalui optimalisasi pelaksanaan lelang, peningkatan kualitas risalah lelang, serta penguatan tata kelola dan kepatuhan administrasi lelang;
- f. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja kantor operasional, melalui analisis data kinerja, revidi laporan periodik, serta monitoring capaian target pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, melalui pembinaan, evaluasi, dan asistensi penyusunan rencana kerja serta penetapan target kinerja kantor operasional di lingkungan Kanwil;
- h. Penguatan sinergi, keseragaman pemahaman, dan koordinasi internal, melalui penyamaan persepsi mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- i. Peningkatan dukungan advokasi dan kepastian hukum, melalui pemantauan, pembahasan, dan pemberian saran dan pendapat hukum terkait permasalahan hukum, sengketa, dan gugatan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

3. Program

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung melaksanakan program-program sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Pengurusan Piutang Negara, meliputi peningkatan kualitas administrasi, pemutakhiran data, serta optimalisasi penyelesaian piutang negara guna menurunkan outstanding berkas kasus piutang negara (BKPN);
- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Piutang Negara, melalui pengawasan atas kelengkapan berkas, penelusuran debitur dan jaminan, serta penguatan tata kelola pembukuan hasil pengurusan piutang negara;
- c. Program Penguatan Pengelolaan Data Kekayaan Negara dan Piutang Negara, melalui penghimpunan, pengolahan, dan pemanfaatan data Daftar Kekayaan Negara dan Piutang Negara (DKPN/DKPB) sebagai dasar pengambilan keputusan;
- d. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Lelang, melalui pengawasan dan evaluasi pelaksanaan lelang, peningkatan kualitas risalah lelang, serta penguatan kepatuhan administrasi dan akuntabilitas lelang;

- e. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lelang, melalui peningkatan volume dan produktivitas lelang, termasuk pengembangan lelang noneksekusi (sukarela dan wajib) serta perluasan basis pengguna jasa lelang;
- f. Program Pembinaan dan Bimbingan Teknis Lelang, guna meningkatkan kapasitas KPKNL, satuan kerja, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan lelang yang efektif dan sesuai ketentuan;
- g. Program Pengelolaan Informasi Publik dan Data Kinerja, melalui bimbingan teknis pengolahan data serta penyajian informasi kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang akurat, transparan, dan mudah diakses;
- h. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia, melalui pelayanan kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta penguatan manajemen kinerja dan budaya organisasi;
- i. Program Pengelolaan Keuangan, melalui pelayanan dan pengendalian pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Program Dukungan Manajemen dan Layanan Umum, melalui penyediaan layanan administrasi umum, sarana dan prasarana, serta dukungan operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil.

4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja berbasis hasil (performance based management), Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025 dan selaras dengan Renstra DJKN, Peta Strategi DJKN, serta kerangka Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

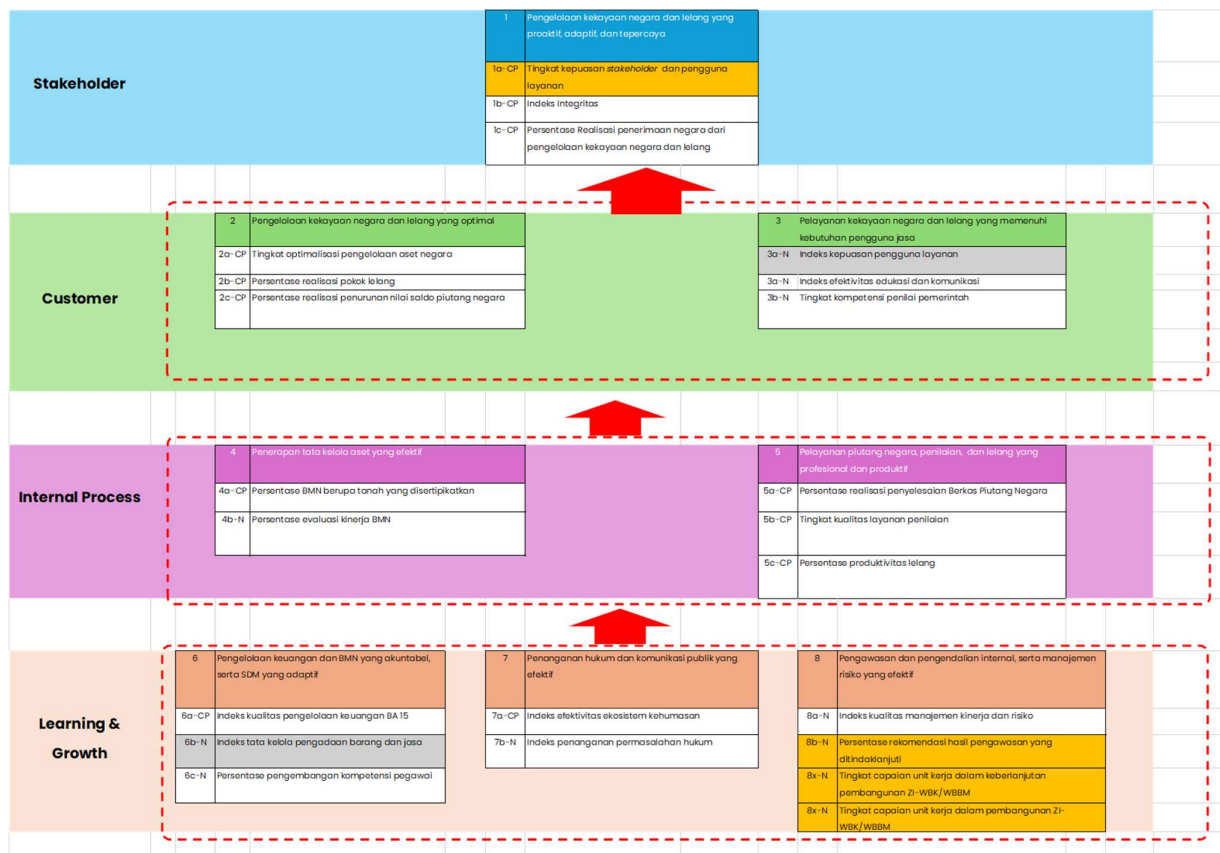
Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran strategis dan target kinerja secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menjadi acuan utama dalam perumusan strategi dan sasaran kinerja. Berdasarkan visi dan misi tersebut, sasaran strategis Kanwil dirumuskan, ditetapkan, dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025, yang menjadi dasar pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi.

PETA STRATEGIS

KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2025



5. Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

disusun sebagai alat manajemen strategis untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi DJKN. Peta Strategis ini diselaraskan dengan Renstra DJKN dan kerangka Nilai Kinerja Organisasi (NKO), serta menjadi dasar penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung terdiri atas empat perspektif, yaitu:

1. Perspektif Stakeholder, yang berfokus pada peningkatan kontribusi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terhadap perekonomian serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dengan Sasaran Strategis
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya Perspektif Pelanggan, yang menekankan peningkatan kualitas layanan, kepuasan pengguna jasa, dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
3. Perspektif Proses Internal, yang diarahkan pada penguatan tata kelola pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang secara efektif dan efisien.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi yang adaptif, serta pengelolaan kinerja dan risiko secara berkelanjutan.

Keempat perspektif tersebut saling terintegrasi dan menjadi landasan dalam perumusan sasaran strategis, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025.

6. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi, sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang berkembang dalam suatu organisasi dan dijadikan pedoman perilaku bagi seluruh anggotanya dalam menghadapi tantangan adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Budaya organisasi berperan penting sebagai fondasi dalam membentuk sikap, etos kerja, serta kualitas pelayanan organisasi.

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mengembangkan budaya organisasi yang disebut "CINDO". Kata cindo berasal dari bahasa Palembang yang bermakna cantik atau bagus, yang melambangkan sesuatu yang indah, menarik, dan bernilai baik. Makna tersebut merefleksikan harapan agar seluruh proses kerja dan layanan Kanwil DJKN SJB dilaksanakan secara berkualitas, profesional, dan bernilai tambah.

Secara konseptual, CINDO merupakan akronim dari nilai-nilai utama organisasi, yaitu:

- Cermat, dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas;
- Ikhlas, dalam memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat;
- iNovatif, dalam mengembangkan cara kerja dan solusi yang adaptif;
- Disiplin, dalam mematuhi ketentuan, waktu, dan standar kerja;
- Objektif, dalam bertindak adil, transparan, dan berbasis data.

Nilai-nilai CINDO menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekaligus menjadi landasan untuk mewujudkan kinerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai penguat internalisasi budaya organisasi, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung juga mengadopsi Yel-Yel DJKN DINAMIS yang dipadukan dengan kearifan lokal sebagai sarana membangun semangat kebersamaan dan kekompakan pegawai. Adapun yel-yel tersebut adalah sebagai berikut:

“DJKN Dinamis!” (diucapkan tiga kali dengan mengepalkan tangan ke udara)

“Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel - Begawe Kite!” (oleh pemandu)

“Galak, Pacak, Padek!” (diucapkan bersama oleh seluruh pegawai)

Makna dari yel-yel tersebut mencerminkan nilai kerja yang dijunjung tinggi oleh Kanwil DJKN SJB, yaitu:

Galak, bekerja dengan niat, kemauan, dan semangat yang kuat;

Pacak, bekerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi;

Padek, bekerja secara profesional, cerdas, dan bertanggung jawab.

Dengan budaya organisasi CINDO yang diperkuat melalui semangat DJKN DINAMIS dan kearifan lokal, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung diharapkan mampu membangun lingkungan kerja yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian kinerja terbaik serta pelayanan publik yang unggul.

BAB II

RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2025 yang menjadi dasar penetapan sasaran, indikator, dan target unit kerja. Perencanaan ini disusun secara berjenjang dan konsisten merujuk pada Rancangan Renstra DJKN 2025–2029, yang menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang, dan pengurusan piutang negara. Dalam kerangka tersebut, sasaran dan target tahunan Unit Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) 2025 dan dikonfirmasi dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sebagai komitmen pelaksanaan kinerja. Bab ini juga memuat arah perencanaan awal PK 2026 sebagai bagian dari kesinambungan siklus manajemen kinerja serta penyesuaian terhadap roadmap dan milestone yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan, termasuk target PK Tahun 2025. Renstra menetapkan arah kebijakan strategis pada bidang pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian, piutang negara, serta penguatan organisasi dan teknologi informasi guna mewujudkan layanan yang akuntabel, produktif, dan inovatif. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi DJKN sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra 2025–2029

1.1. Visi DJKN 2025-2029

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”

Visi ini menggambarkan arah jangka panjang DJKN dalam menjalankan mandat pengelolaan kekayaan negara. Penjabaran atas visi tersebut mencakup empat dimensi utama:

1. Akuntabel (Accountable)

Mengandung makna bahwa seluruh proses pengelolaan BMN, piutang negara, layanan penilaian, dan lelang harus dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan hukum.

- Akuntabilitas ini diwujudkan melalui:
- penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi,
- keandalan data dalam SIMAN, SIP, dan aplikasi lelang,
- kepatuhan pada regulasi BMN, penilaian, piutang, dan lelang,
- konsistensi penyampaian layanan publik yang memenuhi standar.

Renstra menegaskan nilai integritas dan pengendalian risiko sebagai bagian dari indikator strategis pada periode 2025-2029.

2. Produktif (Productive)

Menggambarkan orientasi DJKN untuk memaksimalkan nilai tambah dari kekayaan negara. Produktivitas diwujudkan melalui:

- optimalisasi pemanfaatan BMN, termasuk peningkatan kontribusi fiskal melalui sewa, KSP, dan underlying asset SBSN,
- peningkatan produktivitas lelang untuk mendukung penyelesaian aset dan penerimaan negara,
- peningkatan pemanfaatan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan fiskal dan kebijakan pemerintah.

Renstra menekankan peningkatan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), pokok lelang, serta kualitas layanan penilaian sebagai tolok ukur produktivitas.

3. Inovatif (Innovative)

Visi ini mengarahkan DJKN untuk memperkuat inovasi dalam seluruh aspek layanan. Dimensi inovatif mencakup:

- transformasi digital melalui penyusunan Grand Design TIK dan integrasi sistem SIMAN-SIP-Lelang,
- pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan kecerdasan buatan,
- inovasi proses bisnis pengurusan piutang negara dan layanan lelang,
- pengembangan metode penilaian baru, termasuk valuasi jasa ekosistem dan SDA.

Inovasi ini ditegaskan dalam Renstra sebagai strategi utama pada arah kebijakan TIK dan modernisasi layanan.

4. Mendukung Visi Kementerian Keuangan

Visi DJKN tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai pilar yang mendukung misi Kemenkeu dalam:

- menjaga pengelolaan fiskal yang sehat,
- meningkatkan efektivitas belanja negara melalui manajemen aset yang optimal,
- memperkuat penerimaan negara melalui lelang dan pemanfaatan aset,
- memastikan tata kelola negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas.

Dengan demikian, visi DJKN memberikan arah strategis agar DJKN tidak hanya mengelola aset negara secara administratif, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi fiskal, dan penguatan tata kelola publik.

1.2. Misi DJKN

Misi DJKN Tahun 2025-2029 menjadi landasan operasional dalam mewujudkan visi organisasi sebagai pengelola kekayaan negara, lelang, penilaian, dan piutang

negara yang akuntabel, produktif, serta inovatif. Misi tersebut diwujudkan melalui lima fokus utama, yaitu:

- a. Pertama, mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan memberi manfaat ekonomi dan sosial, yang mencakup pengamanan aset negara, peningkatan kualitas data dan sertifikasi BMN, serta optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung penerimaan negara dan pelayanan publik.
- b. Kedua, mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya melalui transformasi digital, transparansi proses, peningkatan edukasi publik, dan penguatan kompetensi pejabat lelang agar layanan lebih efektif dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
- c. Ketiga, mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan, dengan meningkatkan kualitas metodologi, memperkuat sistem informasi penilaian, serta memperluas peran penilaian dalam mendukung keputusan fiskal dan kebijakan aset pemerintah.
- d. Keempat, mewujudkan pengelolaan pengurusan piutang negara yang dapat diandalkan melalui penyempurnaan regulasi, penataan proses bisnis PUPN, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang negara.
- e. Kelima, mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif, termasuk optimalisasi kompetensi SDM, peningkatan tata kelola internal, serta pengembangan arsitektur TIK yang mendukung integritas data dan keberlanjutan layanan.

Kelima misi ini menjadi dasar dalam perencanaan kinerja tahunan serta arah strategis DJKN dalam penguatan tata kelola dan pelayanan publik sepanjang periode Renstra.

1.3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis DJKN Tahun 2025-2029 menggambarkan arah capaian jangka menengah yang ingin diraih organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, lelang, dan penilaian yang akuntabel, produktif, dan inovatif.

Tujuan strategis tersebut meliputi lima area utama yang menjadi fondasi pelayanan DJKN yang meliputi:

1. Pertama, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara tertib, memberikan nilai tambah, serta mendukung penyelenggaraan tugas pemerintah dan program pembangunan. Optimalisasi ini ditempuh melalui peningkatan akurasi data BMN, percepatan sertifikasi tanah, penguatan pengawasan dan pembinaan BMN idle, serta perluasan pemanfaatan aset negara secara produktif, termasuk dalam penyediaan underlying asset SBSN.
2. Kedua, modernisasi layanan lelang difokuskan pada transformasi proses bisnis lelang agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pengguna. Hal ini dilaksanakan melalui digitalisasi layanan, penyempurnaan platform Lelang Indonesia, penguatan integrasi data dengan SIMAN dan SIP, serta peningkatan

kompetensi pejabat lelang guna mendukung peningkatan realisasi pokok lelang dan produktivitas lelang sebagai bagian dari kontribusi DJKN terhadap penerimaan negara.

3. Ketiga, peningkatan kualitas penilaian dan layanan advisori bertujuan memperkuat akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu layanan penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penguatan ini mencakup pengembangan Sistem Informasi Penilaian (SIP), peningkatan metodologi penilaian, pelaksanaan valuasi jasa ekosistem SDA, serta penyusunan regulasi dan standar baru dalam layanan penilaian dan advisori.
4. Keempat, penguatan pengurusan piutang negara diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang negara melalui penyempurnaan regulasi (termasuk RPerpres Komite Hak Tagih Negara dan revisi PP 28/2022), pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti SIMPaN, penggunaan automatic blocking system, serta pembinaan pelaksanaan PMK 52/2024 pada Badan/Lembaga Khusus. Tujuan ini memastikan proses penagihan lebih tertib, terukur, dan memberikan kepastian hukum serta penyelesaian yang optimal.
5. Kelima, penguatan sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi informasi merupakan tujuan strategis yang mendukung seluruh layanan inti DJKN. Penguatan ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai, penataan proses bisnis organisasi, penyusunan Grand Design TIK, integrasi sistem aplikasi strategis (SIMAN-SIP-Lelang), serta penguatan Sistem Pengendalian Internal dan manajemen risiko. Tujuan ini memastikan DJKN memiliki kapasitas organisasi yang adaptif dan inovatif dalam merespons dinamika kebijakan fiskal dan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, tujuan strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan sasaran, indikator, dan kegiatan dalam Renja dan PK Tahun 2025, sekaligus menjadi peta jalan bagi pencapaian kinerja DJKN selama periode Renstra 2025-2029.

1.4. Sasaran Strategis (SS) DJKN 2025-2029

Renstra menetapkan lima Sasaran Strategis utama (berdasarkan struktur arah kebijakan dalam dokumen), yaitu:

- SS 1 - Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan memberi manfaat ekonomi dan sosial, Termasuk pengelolaan BMN, barang milik negara lain-lain, investasi pemerintah, dan piutang negara.

Indikator utama:

- Indeks Pengelolaan Aset (CP),
- Persentase akurasi data IGT BMN,
- Persentase BMN tanah yang disertipkatkan,
- Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara,
- Persentase penyelesaian berkas piutang negara.

- SS 2 - Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan
Indikator:
 - Tingkat kualitas layanan penilaian,
 - Indeks ketergunaan hasil penilaian SDA.
- SS 3 - Layanan lelang yang modern dan tepercaya
Indikator:
 - Persentase realisasi pokok lelang,
 - Persentase produktivitas lelang.
- SS 4 - Pengelolaan sumber daya organisasi dan TI yang adaptif dan inovatif
Indikator:
 - Tingkat keandalan sistem informasi Kemenkeu (CP),
 - Tingkat kualitas data dan pemanfaatan AI.
- SS 5 - Pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif
Indikator:
 - Indeks SPI terintegrasi,
 - Indeks integritas.

1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan tolok ukur pencapaian sasaran strategis organisasi dan menjadi dasar perumusan sasaran kinerja tahunan dalam Rencana Kerja serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada seluruh tingkatan organisasi, termasuk Kantor Wilayah DJKN. Kanwil DJKN mengacu pada IKU Renstra yang relevan dengan tugas dan fungsi di wilayah, yang selanjutnya dijabarkan secara berjenjang ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan strategis DJKN, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.. Beberapa indikator strategis yang relevan dengan tugas unit antara lain:

- a. Indikator bidang BMN (SS 1.1)
 - Indeks Pengelolaan Aset (CP) (Target 2025: 3,00).
 - Persentase akurasi data IGT BMN (Target 2025-2029: 100%).
 - Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (Target 2025-2029: 100%).
- b. Indikator bidang Lelang (SS 3.1)
 - Persentase realisasi pokok lelang (Target 2025: 100%).
 - Persentase produktivitas lelang (Target 2025: 80%).
- c. Indikator bidang Penilaian (SS 2.1)
 - Tingkat kualitas layanan penilaian (Target 2025: 70).
 - Indeks ketergunaan hasil penilaian SDA (Target 2025: 70).

d. Indikator bidang Piutang Negara (SS 1.4)

- Penurunan saldo piutang negara.
- Penyelesaian berkas piutang negara.

e. Indikator bidang KIH (SS 4.2-4.3)

- Tingkat keandalan sistem informasi (Target 2025: 100%).
- Indeks integritas (Target 2025: 100%).
- Indeks kualitas SPI terintegrasi (Target 2025: 92.5).

1.6. Arah Kebijakan dan Milestone Renstra

Arah kebijakan dan milestone Renstra DJKN 2025-2029 menjadi pedoman bagi Kanwil DJKN dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pengendalian atas seluruh layanan strategis yang dijalankan KPKNL di wilayah. Arah kebijakan memberikan fokus prioritas pada penguatan tata kelola BMN, peningkatan kualitas layanan lelang dan penilaian, penyempurnaan pengurusan piutang negara, serta modernisasi organisasi dan teknologi informasi. Sementara itu, milestone Renstra menetapkan tahapan capaian tahunan yang harus dipastikan progresnya oleh Kanwil, seperti validasi dan sertifikasi BMN, digitalisasi layanan lelang, pengembangan SIP, penguatan sistem informasi dan integritas data, serta penerapan SPI dan manajemen risiko terintegrasi. Dengan demikian, arah kebijakan dan milestone Renstra menjadi dasar bagi Kanwil dalam memastikan sinergi, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan perencanaan kinerja tahunan di seluruh unit vertikal.

Renstra DJKN menetapkan milestone tahunan yang menjadi tolok ukur implementasi strategi secara bertahap, meliputi:

A. Milestone Bidang BMN

- Tahun 2025:
 - Validasi 20.025 bidang tanah BMN,
 - Pengembangan endpoint data untuk akses ATR/BPN,
 - Pengembangan modul sertifikasi pada SIMAN V2,
 - Penuntasan pensertipikatan sebagian bidang,
 - Monitoring dan evaluasi pencapaian IGT BMN.
- Tahun 2026-2029:
 - Penyempurnaan regulasi BMN,
 - Pengembangan Master Aset SIMAN 2,
 - Penguatan kebijakan BMN idle,
 - Pengembangan peta tematik BMN,
 - Penyelesaian kasus tanah bermasalah,
 - Penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang lebih luas.

B. Milestone Bidang Lelang

- transformasi desain proses bisnis layanan lelang,
- Penyempurnaan platform Lelang Indonesia,
- Integrasi layanan lelang dengan SIMAN dan SIP,
- Peningkatan kompetensi pejabat lelang,
- Edukasi publik dan perluasan akses pasar lelang.

C. Milestone Bidang Penilaian

- Penguatan SIP (Sistem Informasi Penilaian),
- Pengembangan alat bantu penilaian dan data pendukung,
- Implementasi penilaian jasa ekosistem SDA,
- Penyusunan dan penyempurnaan regulasi penilaian,
- Pelaksanaan pilot analysis of socio-economic impact untuk pemanfaatan BMN.

1.7. Keterkaitan Renstra dengan Perencanaan Kinerja Tahunan (2025)

Sasaran Strategis, IKU, dan milestone Renstra menjadi dasar bagi unit kerja dalam menetapkan sasaran kinerja tahunan, yang kemudian dijabarkan ke dalam:

1. Renja 2025 → memuat kegiatan prioritas, regulasi, dan inisiatif strategis.
2. Perjanjian Kinerja (PK) 2025 → memuat indikator yang dikontrakkan dan target capaian.
3. Penyusunan PK 2026 → mengikuti milestone Renstra tahun kedua.

Dengan demikian, Renstra merupakan dokumen fundamental yang memastikan bahwa seluruh target tahunan unit berada dalam lintasan strategis jangka menengah yang konsisten dan terukur.

2. Rencana Kerja Tahun 2025

Renja 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan Renstra DJKN 2025-2029. Ia memuat prioritas program, keluaran, dan dukungan sumber daya yang terintegrasi agar target PK tercapai pada tahun berjalan. Fokus substansi mengikuti Sasaran Strategis Renstra (BMN, Lelang, Penilaian, Piutang) dan sistem pendukung (TIK, SPI, SDM, PBJ, komunikasi & hukum)

2.1 Core Domains (Turunan SS Renstra)

1. BMN (SS 1.1)

- Validasi & IGT BMN: validasi 20.025 bidang tanah, money IGT; sinkronisasi dengan ATR/BPN (endpoint KSB); penguatan data spasial–basis akurasi 100%.
- Sertifikasi Tanah: penuntasan sertifikasi termasuk kasus sebagian bidang/hibah/ASP, sebagai prasyarat pemanfaatan & underlying SBSN.
- Optimalisasi & BMN Idle: pembinaan pengguna barang, tindak lanjut PMK 120/2024, dan pengukuran optimalisasi asset.
- SIMAN V2: pengembangan modul sertifikasi & perencanaan, integrasi dengan ekosistem Kemenkeu/ATR.

- Keterkaitan PK 2025: 2a-CP (optimalisasi), 4a-CP (sertifikasi 100%), 4b-N (evaluasi kinerja BMN 100%).
2. Lelang (SS 3.1)
 - Transformasi layanan: digitalisasi penuh proses bisnis & penyempurnaan platform Lelang Indonesia; edukasi pasar & perluasan akses.
 - Interkoneksi: integrasi data objek lelang dengan SIMAN & SIP; peningkatan keamanan & keandalan layanan.
 - SDM lelang: capacity building & uji kualitas berkelanjutan.
 - Keterkaitan PK 2025: 2b-CP (pokok lelang 100%/Rp1,9 T), 5c-CP (produktivitas 80%), 1b-CP (penerimaan Rp92 M)
 3. Penilaian (SS 2.1)
 - Penguatan SIP: integrasi data penilaian nasional & peningkatan alat bantu analisis.
 - Valuasi SDA & advisory: valuasi jasa ekosistem; penguatan regulasi SPPSDA & SPB; kerangka advisory untuk K/L & Pemda.
 - Peningkatan kualitas layanan: standardisasi proses & peningkatan keterpakaian hasil penilaian.
 - Keterkaitan PK 2025: 5b-CP (kualitas layanan 70%), 3c-N (kompetensi penilai 70%).
 4. Piutang Negara (SS 1.4)
 - Regulasi & kebijakan: penyusunan RPerpres Komite Hak Tagih Negara & RPP perubahan PP 28/2022 (pondasi proses bisnis PUPN & pengelolaan PN K/L).
 - Sistem & data: pengembangan BKPN online; Automatic Blocking System (focusPN-SIMPONI-CIESA) sebagai prasyarat SIMPaN; persiapan migrasi data.
 - Sinergi implementasi: sosialisasi & dukungan implementasi PMK 52/2024 pada Badan/Lembaga Khusus/BHP.
 - Keterkaitan PK 2025: 2c-CP (penurunan saldo PN Rp4,2 M), 5a-CP (penyelesaian berkas PN 100%).

2.2. Sistem Pendukung Kinerja

1. Tata Kelola Anggaran & PBJ

- Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKPA) dalam PK Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 100. Pengelolaan anggaran yang berkualitas dan tata kelola pengadaan yang patuh untuk memastikan dukungan sumber daya ke seluruh kegiatan Renja.
- Penguatan tata kelola pengadaan dilakukan melalui monev PBJ, perbaikan dokumen perencanaan, dan kepatuhan prosedur. Ini mendukung target 6b-N yaitu tata kelola PBJ sebesar 100%.

2. SDM & Kompetensi

Pengembangan kompetensi pegawai pada Tahun 2025 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan teknis dan substantif pada fungsi BMN, lelang, penilaian, dan piutang negara sebagai upaya memperkuat kapasitas pelaksana layanan di KPKNL maupun Kanwil. Kegiatan ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan

kompetensi, job matching, serta penguatan Community of Practice (CoP) sebagai wadah berbagi pengetahuan dan praktik terbaik sesuai arah Renstra DJKN 2025-2029 yang menekankan profesionalisasi dan peningkatan kinerja SDM. Upaya tersebut mendukung pencapaian indikator PK 2025, yaitu 6c-N (Persentase Pengembangan Kompetensi 80%) dan 3c-N (Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah 70%), dengan memastikan tersedianya SDM yang kompeten dan relevan terhadap tuntutan proses bisnis strategis DJKN.

3. Sitem Pemerintah Berbasis Elektronik - SPBE/TIK (SS 4.2)

Renja 2025 diarahkan pada penyusunan Grand Design TIK, integrasi SIMAN-SIP-Lelang, serta penguatan keamanan aplikasi. Kegiatan ini mendukung operasionalisasi layanan BMN, Lelang, dan Penilaian. Penguatan tata kelola TIK melalui fasilitasi dan monitoring penyusunan Grand Design TIK DJKN serta pengawasan implementasi integrasi aplikasi strategis—SIMAN, SIP, dan Aplikasi Lelang—di seluruh KPKNL dalam wilayah kerja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan konsistensi arsitektur sistem, standarisasi data, dan interoperabilitas layanan sesuai arah kebijakan Renstra DJKN 2025-2029 mengenai sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Selain itu, Kanwil mengoordinasikan pemantauan keamanan informasi, kesiapan infrastruktur digital, dan kepatuhan terhadap prinsip SPBE guna mendukung akurasi data dan keberlanjutan layanan pada proses penatausahaan BMN, pelaksanaan lelang, dan pelayanan penilaian. Dengan demikian, penguatan TIK menjadi fondasi operasional bagi Kanwil dalam menjaga efisiensi, akurasi, dan ketertelusuran data sebagai bagian dari pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4. Pengendalian Internal & Manajemen Risiko (SS 4.3)

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN melaksanakan penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan manajemen risiko sebagai bagian dari komitmen terhadap Sasaran Strategis 4.3 - Pengendalian Internal yang bernilai tambah, sebagaimana diatur dalam Renstra DJKN 2025-2029. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan, monitoring, dan reviu penerapan risk control matrix (RCM) di seluruh proses bisnis strategis KPKNL, termasuk sertifikasi BMN, validasi IGT, pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara, dan pemrosesan data melalui SIP dan SIMAN. Kanwil juga memperkuat peran lini pertama melalui pengawasan melekat, penyelarasan SOP, serta money kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan kekayaan negara dan integritas data. Selain itu, audit internal tematik dan pemantauan risiko operasional secara berkala dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan memastikan efektivitas mitigasi risiko oleh KPKNL. Seluruh upaya ini mendukung pencapaian indikator PK 2025, yaitu 1a-CP (Indeks Integritas 100) dan 8a-N (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 80), serta memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal di wilayah berjalan konsisten, terintegrasi, dan mampu menjaga akuntabilitas kinerja organisasi.

5. Komunikasi Publik & Hukum

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN memperkuat fungsi komunikasi publik melalui pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan strategi kehumasan KPKNL, termasuk peningkatan kualitas publikasi digital, konsistensi pesan layanan, serta penyebaran informasi terkait BMN, Lelang, Penilaian, dan Piutang Negara untuk mendukung transparansi dan efektivitas layanan. Upaya ini mendukung pencapaian

indikator 7a-CP (Efektivitas ekosistem kehumasan, target 3,55). Selain itu, Kanwil melaksanakan asistensi dan pengawasan atas penanganan permasalahan hukum di KPKNL—seperti sengketa BMN, isu penilaian, perikatan lelang, dan kasus pengurusan piutang negara—guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan serta mitigasi risiko hukum. Langkah tersebut berkontribusi pada pencapaian indikator 7b-N (Penanganan permasalahan hukum, target 100) dan menjaga integritas pelaksanaan tugas DJKN di wilayah.

6. Komunikasi Publik & Hukum

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN memperkuat fungsi komunikasi publik melalui pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan strategi kehumasan KPKNL, termasuk peningkatan kualitas publikasi digital, konsistensi pesan layanan, serta penyebarluasan informasi terkait BMN, Lelang, Penilaian, dan Piutang Negara untuk mendukung transparansi dan efektivitas layanan. Upaya ini mendukung pencapaian indikator 7a-CP (Efektivitas ekosistem kehumasan, target 3,55). Selain itu, Kanwil melaksanakan asistensi dan pengawasan atas penanganan permasalahan hukum di KPKNL—seperti sengketa BMN, isu penilaian, perikatan lelang, dan kasus pengurusan piutang negara—guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan serta mitigasi risiko hukum. Langkah tersebut berkontribusi pada pencapaian indikator 7b-N (Penanganan permasalahan hukum, target 100) dan menjaga integritas pelaksanaan tugas DJKN di wilayah.

2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan Adendum Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung disusun berdasarkan Renstra DJKN 2025-2029 dan Renja Tahun 2025, sehingga indikator kinerja, target, dan rencana aksi yang ditetapkan selaras dengan sasaran strategis organisasi serta mandat pembinaan, supervisi, dan monitoring kinerja unit vertikal (KPKNL). Penyusunan dilakukan melalui penelaahan indikator turunan Renstra yang relevan dengan tugas dan fungsi Kanwil, perumusan target yang terukur dan berbasis data, validasi definisi operasional-formula-sumber data-penanggung jawab, serta penetapan PK sebagai kontrak kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sepanjang tahun berjalan. Substansi PK mencakup indikator bidang BMN, Lelang, Penilaian, dan Pengurusan Piutang Negara, beserta indikator pendukung (integritas, manajemen risiko/SPI, kinerja anggaran/IKPA, PBJ, pengembangan kompetensi, kehumasan, dan penanganan hukum), yang keseluruhannya merupakan turunan langsung dari dokumen perencanaan strategis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan kinerja tahun berjalan dan perkembangan data pengurusan piutang negara, dilakukan penyesuaian terhadap indikator 2c-CP - Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara melalui Adendum PK Nomor 13A/KN/2025 tertanggal 17 November 2025, yakni perubahan target dari semula 100% (Rp4,25 miliar) menjadi 100% (Rp4,7 miliar).

Dengan diterbitkannya adendum tersebut, seluruh pengukuran, analisis capaian, dan pelaporan kinerja tahun 2025 mengacu pada target terbaru dimaksud.

Penetapan dan implementasi adendum tercermin dalam Kertas Kerja NKO 2025, yang menunjukkan bahwa indikator 2c-CP mencapai realisasi kinerja hingga 178,26% (indeks capaian sebelum pembatasan maksimum), sehingga berkontribusi signifikan terhadap nilai sasaran strategis dan perspektif kinerja terkait. Angka capaian ini kemudian di-cap sesuai ketentuan indeks maksimum saat penghitungan agregat. Seluruh capaian indikator PK 2025, termasuk perubahan target pada 2c-CP, telah dimutakhirkan dalam lembar NKO dan Rekap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025.

Adendum PK

2c-CP: Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

| Aspek | PK Awal | Adendum PK | Realisasi 2025 (NKO) |
|-------------------------|--|--|--|
| Dokumen | PK-13/KN/2025, 31 Jan 2025 | 13A/KN/2025, 17 Nov 2025 | Kertas Kerja NKO 2025 (Rekap & NKO Addendum) |
| Rumus Indikator | <i>2c-CP - Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara</i> | Tidak berubah (tetap 2c-CP dengan rumusan yang sama) | 2c-CP tercermin dalam perhitungan NKO (kolom realisasi & indeks capaian) |
| Target (%) | 100% | 100% (tidak berubah) | Indeks capaian dihitung vs target 100% (pra-cap) 178,26% |
| Target Nominal | Rp4,20 miliar | Rp4,70 miliar | Rp8,39 miliar (8.392.861.330,24) |
| Rincian Target Triwulan | Q1-Q4 ditetapkan 100% (TLK) | Tidak berubah: Q1-Q4 tetap 100%; penyesuaian pada angka nominal tahunan | Realisasi triwulanan terakumulasi pada NKO; capaian akhir dihitung untuk indeks NKO |
| Catatan Dampak | - | Perubahan hanya pada target nominal tahunan (Rp4,25 M → Rp4,7 M); persentase & struktur TLK tetap. | NKO menampilkan capaian 178,26% (sebelum pembatasan); penghitungan agregat menggunakan batas indeks maks. 120 sebagaimana format NKO |

Tabel 3. Adendum PK 2c-CP: Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

Keterangan:

- Adendum PK 13A/KN/2025 menetapkan kenaikan target nominal indikator 2c-CP dari Rp4,25 M menjadi Rp4,7 M, tanpa mengubah target persentase (tetap 100%) maupun pola TLK triwulanan (tetap 100% per triwulan).
- Pada Kertas Kerja NKO 2025, realisasi 2c-CP mencapai ≈Rp8,39 M dengan indeks capaian 178,26% (sebelum cap 120), dan kemudian diakomodasi sesuai ketentuan indeks maksimum pada agregasi nilai.
- Indeks capaian indikator dihitung terlebih dahulu berdasarkan perbandingan realisasi terhadap target 100% secara murni (tanpa batas maksimum), baru setelah itu nilai dibatasi (di-cap) sebelum digabungkan ke perhitungan nilai kinerja organisasi (NKO).

2.4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Arah Penyusunan PK Tahun 2026

Sebagai bagian dari siklus perencanaan berkelanjutan, penyusunan PK 2026 mempertimbangkan:

1. Milestone Renstra Tahun 2026

Contoh milestone pada bidang piutang negara:

- Penyusunan RPKM turunan Perubahan PP 28/2022 dan revisi PMK 240/2016.
- Migrasi data focusPN → SIMPaN dan implementasi modul penatausahaan SIMPaN.
- Monev implementasi PMK 52/2024.

2. Penyesuaian Indikator

Mulai diberlakukannya indikator Renstra tahun 2026, seperti persentase sinkronisasi data Piutang Negara pada K/L.

3. Penetapan Target 2026

Target disusun dengan mempertimbangkan capaian 2025, kapasitas sumber daya, dan kesiapan sistem informasi.

4. Koordinasi Penetapan Target

Proses penetapan target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme koordinasi antara unit pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Eselon I), Kantor Wilayah DJKN (Eselon II), unit Eselon III, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit pelaksana teknis. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan selaras dengan amanat Rancangan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, prioritas nasional, serta dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2026, sekaligus mempertimbangkan kapasitas implementasi di tingkat operasional.

Pada tingkat Eselon I (DJKN), penetapan target diawali dengan penyampaian arah kebijakan strategis, target nasional bidang kekayaan negara,

penilaian, lelang, dan piutang negara, serta penetapan indikator kinerja prioritas yang menjadi dasar penyusunan PK. Unit pusat juga menyediakan baseline kinerja, trajectory pencapaian, serta pedoman teknis perhitungan indikator sebagai acuan bagi Kantor Wilayah dan KPKNL dalam menyusun usulan target kinerja.

Pada tingkat Eselon II (Kanwil DJKN), dilakukan konsolidasi target melalui forum koordinasi dengan seluruh KPKNL di wilayah kerja. Konsolidasi tersebut mencakup penilaian terhadap kemampuan pelaksanaan, kesiapan data, serta karakteristik dan kondisi wilayah. Berdasarkan hasil konsolidasi tersebut, Kanwil DJKN menyusun proyeksi target wilayah dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, perkembangan beban kerja, serta kebutuhan pembinaan terhadap KPKNL. Hasil proses ini menjadi dasar penyusunan draft PK Kanwil yang tetap berada dalam koridor target yang ditetapkan oleh Eselon I.

Selanjutnya, pada tingkat Eselon III, masing-masing bidang teknis melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap target yang diusulkan, termasuk pemetaan kapasitas internal, kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi, serta perumusan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Penelaahan ini memastikan keterkaitan dan kontribusi setiap bidang terhadap pencapaian sasaran dalam PK Kanwil.

Pada tingkat unit pelaksana teknis, Kepala KPKNL berperan aktif dalam proses finalisasi target melalui penyampaian masukan berbasis kondisi riil operasional, antara lain terkait profil piutang negara, volume permohonan penilaian, ketersediaan objek lelang, serta kondisi pengelolaan barang milik negara di wilayah kerja masing-masing. Kepala KPKNL juga memastikan bahwa target turunan yang ditetapkan masih berada dalam batas kemampuan unit kerja, sekaligus menyatakan komitmen atas pencapaiannya sebagai bagian dari kontribusi terhadap kinerja Kanwil DJKN dan DJKN secara keseluruhan.

elalui mekanisme koordinasi penetapan target tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun secara terukur, selaras dengan perencanaan strategis, serta dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan indikator kinerja yang telah diselaraskan pada seluruh tingkatan organisasi, mulai dari Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga KPKNL.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung secara berkelanjutan melaksanakan penilaian kinerja terhadap unit organisasi maupun individu di lingkungan kerja. Penilaian kinerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan.

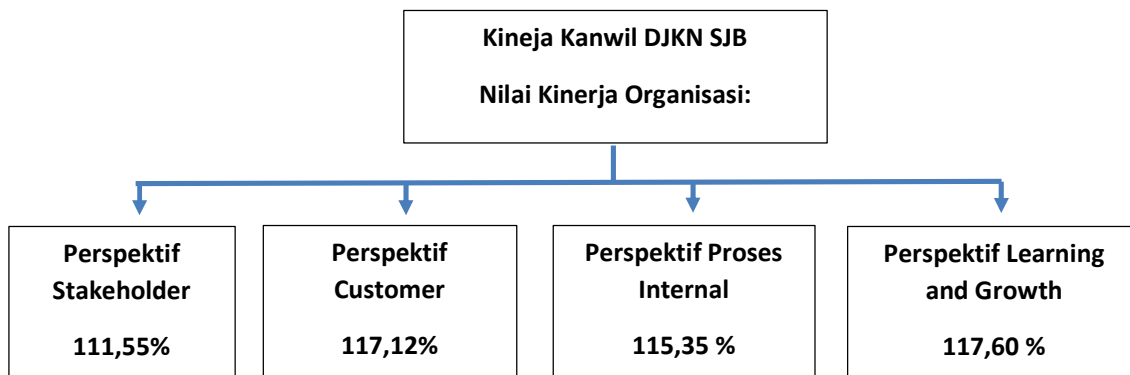
Berdasarkan hasil evaluasi atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan Two pada Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,13%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara agregat kinerja organisasi berada di atas target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi dan program kerja Kanwil.

Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan hasil akumulasi capaian kinerja pada masing-masing perspektif dalam Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, yang meliputi:

1. Perspektif Stakeholder, yang menggambarkan kontribusi Kanwil dalam mendukung penerimaan negara dan perekonomian;
2. Perspektif Customer, yang mencerminkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan;
3. Perspektif Proses Internal, yang menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis utama;
4. Perspektif Learning and Growth, yang menunjukkan kesiapan sumber daya manusia, sistem, dan tata kelola organisasi dalam mendukung keberlanjutan kinerja.

Capaian pada masing-masing perspektif tersebut secara rinci disajikan pada uraian berikut.

BAGAN ORGANISASI



Tabel 4. Bagan Organisasi

Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki capaian kinerja yang sangat baik dengan seluruh 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) berada pada status hijau. Capaian tersebut tercermin dari realisasi tiap IKU yang melampaui target, dengan nilai capaian berkisar antara 101,39% hingga 185%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel Kinerja
Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung
Tahun 2026

| Kode | Indikator Kinerja Utama | Validitas Kendali | Target 2025 | Realisasi 2025 | Indeks Maksimal (120%) | Ket. |
|------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|------------------------|--------|
| Stakeholder Perspective (30) | | | | | | 111,55 |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | 111,55 |
| 1a-CP | Indeks Integritas | P/L | 100% | 105,32% | 105,32% | 60,64 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | P/M | 100% | 129,66% | 120,00 % | 50,91 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|---------|---------|----------|--------|
| Customer Perspective (20%) | | | | | | 117,12 |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | 114,25 |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | P/L | 100,00% | 104,25 | 104,25 % | 38,09 |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/L | 100,00% | 120,77% | 120,00 % | 43,85 |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | P/M | 100,00% | 178,26% | 120,00 % | 32,31 |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | 120,00 |
| 3a-N | "Indeks kepuasan pengguna layanan | P/M | 77,00 | 95,48 | 120,00 | 40,00 |
| 3b-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | P/M | 74,00 | 94,29 | 120,00 | 40,00 |
| 3c-N | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | P/M | 70,00 | 91,33 | 120,00 | 40,00 |
| Internal Process Perspective (25%) | | | | | | 115,35 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | 110,69 |
| 4a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | P/M | 100,00% | 101,39% | 101,39 | 50,69 |
| 4b-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | P/M | 100,00% | 120,00% | 120,00 | 60,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--------|---------|--------|--------|
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | 120,00 |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | P/M | 100% | 156,96% | 120,00 | 40,00 |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | P/M | 70% | 113,84% | 120,00 | 40,00 |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | P/M | 80,00% | 108,70% | 120,00 | 40,00 |
| Learning and Growth Perspective (25%) | | | | | | 117,60 |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | 116,67 |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | P/M | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 40,00 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | P/M | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 36,67 |
| 6x-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | P/M | 80,00% | 100,00% | 120,00 | 40,00 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | 116,13 |
| 7a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | P/M | 3,55 | 6,57 | 120,00 | 60,00 |
| 7b-N | Indeks penanganan permasalahan hukum | P/M | 100,00 | 112,25 | 112,25 | 56,13 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | 120,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-----|-------|-------|--------|--------|
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | P/M | 80,00 | 96,49 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | | 115,12 |

Tabel 5.1 Tabell Kinerja

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kegiatan selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara mencakup keseluruhan siklus manajemen Barang Milik Negara (BMN), meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pengawasan dan pengendalian BMN. Rangkaian fungsi tersebut berperan langsung terhadap kontribusi DJKN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara.

Selaras dengan tugas tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menetapkan Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian, yang diukur melalui indikator kontribusi penerimaan negara dari BMN dan layanan lelang sepanjang tahun 2025.

Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian pada Tahun 2025 berhasil dicapai dengan kinerja sangat baik, didukung oleh:

- Realisasi PNBPN 129,66%,
- IKU Produktivitas Lelang 135,87%,
- IKU Kualitas Layanan Penilaian 162,63%,
- serta NKO Kanwil DJKN SJB 115,13%.

I. Capaian IKU Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|--|--------|-----------|----------|
| 1a-CP | Indeks Integritas | 100% | 105,32% | 105,32% |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 129,66% | 120,00 % |

Tabel 5.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Note: Data Indeks Integritas telah disesuaikan sesuai ND-561/KN.1/2026: Realisasi 94,12 (105,32%).

1. 1a-CP. Indeks Integritas, Realisasi 105,32 dari Target 100,00.

Indeks Integritas merupakan indikator yang menilai tingkat kepercayaan publik, perilaku etika pegawai, pencegahan korupsi, dan kualitas tata kelola dalam pelaksanaan layanan. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN SJB berhasil mencapai nilai 105,32, melampaui target 100,00.

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretariat DJKN Nomor ND-561/KN.1/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Perubahan Realisasi IKU Indeks Integritas 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah menyesuaikan angka capaian IKU 1a-CP (Indeks Integritas) dari 105,29% menjadi 105,32% (Realisasi 94,12). Penyesuaian ini bersifat korektif minor dan tidak mengubah kesimpulan kinerja, namun diselaraskan pada Kertas Kerja NKO, LCK, serta dokumen LAKIN 2025 untuk menjamin konsistensi data.

Capaian ini menunjukkan:

- meningkatnya kepercayaan stakeholders terhadap layanan DJKN;
- berfungsinya mekanisme pengawasan internal secara efektif;
- penguatan budaya organisasi berbasis nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- peningkatan transparansi pada seluruh proses layanan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Realisasi ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian sasaran strategis, dengan bobot perhitungan yang signifikan dalam penilaian kinerja.

2. 1b-CP. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang-Realisasi 129,66% dari Target 100%

Indikator ini mengukur kontribusi layanan DJKN terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya melalui:

- pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN),
- pelaksanaan lelang (bea lelang, hasil lelang tertentu, biaya balai lelang),
- serta layanan pengurusan piutang negara.

Pada tahun 2025, Kanwil DJKN SJB berhasil merealisasikan 129,66% dari target penerimaan negara, melampaui target yang ditetapkan (100%). Capaian ini menggambarkan:

- meningkatnya produktivitas layanan lelang;
- optimalisasi pemanfaatan BMN;
- meningkatnya kontribusi pelayanan piutang negara;
- tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan instansi terhadap mekanisme lelang DJKN;
- membaiknya koordinasi antara Kanwil, KPKNL, dan satuan kerja pemilik BMN.

Realisasi penerimaan negara ini tidak hanya menunjukkan efektivitas proses internal DJKN, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kontribusi fiskal dan perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, pencapaian kedua IKU tersebut menghasilkan nilai sasaran strategis 111,53, menempatkan kinerja Kanwil DJKN SJB Tahun 2025 dalam kategori sangat baik. Kinerja ini selaras dengan realisasi total PNPB yang juga tinggi serta mendukung capaian NKO Kanwil DJKN SJB Tahun 2025 sebesar 115,13, yang mencerminkan kualitas layanan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang.

II. Capaian IKU Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|---|---------|-----------|---------|
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100,00% | 104,25 | 38,09 |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100,00% | 120,77% | 43,85 |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100,00% | 178,26% | 32,31 |

Tabel 5.3 Capaian IKU Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Sasaran strategis “Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal” mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset negara,

penyelenggaraan lelang, serta penyelesaian piutang negara. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mencatat nilai sasaran strategis sebesar 114,25, menunjukkan bahwa proses internal DJKN telah berjalan secara optimal dan melampaui target.

Sasaran strategis ini diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, persentase realisasi pokok lelang, dan persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara. Ketiga IKU tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelayanan dan pengelolaan aset negara di wilayah Kanwil DJKN SJB.

1. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara - Realisasi 104,25% (Target 100%)

IKU ini mengukur efektivitas pengelolaan aset negara melalui pemanfaatan BMN, penilaian, pengamanan, penatausahaan, serta dorongan bagi satuan kerja dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki.

Pada tahun 2025, capaian sebesar 104,25% menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di wilayah Kanwil DJKN SJB telah berjalan secara efektif.

Pencapaian ini mencerminkan:

- meningkatnya pemanfaatan BMN yang memberikan kontribusi penerimaan negara,
- perbaikan koordinasi antara Kanwil, KPKNL, dan satuan kerja,
- kualitas layanan penilaian yang tinggi (IKU terkait menunjukkan capaian 162,63%),
- peningkatan tertib administrasi dan tata kelola BMN di satker.

Capaian ini mendukung optimalisasi nilai ekonomi aset negara sekaligus meningkatkan kontribusi PNBPN dari sektor BMN.

2. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang - Realisasi 120,77% (Target 100%)

Indikator ini mengukur efektivitas pelaksanaan lelang terhadap target pokok lelang yang direncanakan dalam tahun berjalan.

Dengan capaian **120,77%**, Kanwil DJKN SJB berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Hasil ini mencerminkan:

- tingginya aktivitas pelaksanaan lelang di KPKNL wilayah kerja,

- meningkatnya minat masyarakat dan instansi pemerintah terhadap mekanisme lelang DJKN,
- penguatan layanan digital seperti e-Lelang,
- keberhasilan pelaksanaan berbagai jenis lelang, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sukarela.

Meskipun terdapat tantangan berupa **ketidakteraturan pencatatan pokok lelang pada Dropbox**, capaian kinerja tetap tinggi dan memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara melalui PNBPN lelang.

3. IKU Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara - Realisasi 178,26% (Target 100%)

IKU ini mengukur efektivitas penyelesaian piutang negara melalui mekanisme penagihan, penetapan, atau tindakan penyelesaian lainnya sesuai ketentuan. Dengan capaian 178,26%, indikator ini menjadi salah satu capaian tertinggi pada sasaran proses internal tahun 2025.

Capaian luar biasa ini menunjukkan bahwa:

- proses penyelesaian piutang negara berjalan sangat efektif,
- terdapat peningkatan jumlah berkas piutang negara yang berhasil ditangani,
- koordinasi antara KPKNL dan instansi penyerah piutang semakin baik,
- kualitas monitoring dan evaluasi penyelesaian piutang meningkat.

Walaupun masih terdapat kasus piutang dengan kendala debitur tidak ditemukan atau jaminan tidak tersedia, secara keseluruhan kinerja penyelesaian piutang negara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan target

III. Capaian IKU Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|------|---|--------|-----------|---------|
| 3a-N | "Indeks kepuasan pengguna layanan | 77,00 | 95,48 | 38,09 |
| 3b-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74,00 | 94,29 | 43,85 |
| 3c-N | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | 70,00 | 91,33 | 32,31 |

Tabel 5.4 Capaian IKU Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Sasaran kinerja pada perspektif pelanggan bertujuan memastikan bahwa layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang

negara, dan lelang yang diberikan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung semakin responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa. Pada tahun 2025, capaian ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kelompok ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh indikator melampaui target dan memberikan kontribusi langsung pada peningkatan nilai Customer Perspective sebesar 117,12.

1. 3a-N. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Realisasi 95,48 (Target 77,00)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2025 mencapai nilai 95,48, jauh melampaui target 77,00. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan DJKN di bidang:

- penilaian BMN,
- pelayanan lelang,
- dan pengurusan piutang negara.

Capaian IKU 3a-N (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) dipengaruhi oleh penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Penerapan prinsip GEDSI paling relevan tercermin pada IKU ini, sekaligus menjadi faktor pendukung capaian IKU lelang dan penerimaan melalui perluasan akses serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Tingginya nilai kepuasan pengguna layanan menunjukkan bahwa masyarakat merasakan peningkatan kualitas layanan DJKN, khususnya dari aspek kecepatan layanan, kejelasan informasi, profesionalisme petugas, dan aksesibilitas. Kondisi tersebut menegaskan efektivitas penerapan standar pelayanan serta penguatan budaya service excellence di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

2. 3b-N. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi - Realisasi 94,29 (Target 74,00)

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi mencapai 94,29, jauh di atas target 74,00, mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi dan public outreach yang dilakukan oleh Kanwil dan KPKNL dalam:

- menyosialisasikan layanan lelang dan BMN,
- memberikan edukasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah,

- meningkatkan literasi publik mengenai mekanisme lelang,
- serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan kekayaan negara.

Efektivitas komunikasi ini turut mendorong meningkatnya minat pemilik barang dan masyarakat untuk memanfaatkan layanan DJKN, khususnya layanan lelang.

3. 3c-N. Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah - Realisasi 91,33 (Target 70,00)

KU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah mencapai nilai 91,33, melampaui target 70,00. Capaian ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis dan profesionalisme para penilai pemerintah di lingkungan Kanwil DJKN SJB terus meningkat melalui:

- pendidikan dan pelatihan teknis berkelanjutan,
- kegiatan in-house training,
- pendampingan penilaian kompleks,
- serta peningkatan sertifikasi dan kapasitas analitis penilai.

Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas layanan penilaian, akurasi nilai BMN, serta kepercayaan stakeholder terhadap rekomendasi penilaian DJKN. Tingginya nilai ini juga mendukung capaian IKU proses internal lainnya, seperti optimalisasi BMN dan pemanfaatannya.

IV. Capaian IKU Penerapan tata kelola aset yang efektif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|---|----------|-----------|---------|
| 4a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikat-kan | 100,00 % | 101,39 % | 50,69 |
| 4b-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100,00 % | 120,00 % | 60,00 |

Tabel 5.5 Capaian IKU Penerapan tata kelola aset yang efektif

1. 4a-CP. Capaian IKU Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif (2025)

Penerapan tata kelola aset yang efektif merupakan elemen penting dalam penguatan peran DJKN sebagai pengelola aset negara. Indikator kinerja pada sasaran ini menilai sejauh mana Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mampu memastikan tertib administrasi BMN, perlindungan hukum atas aset negara, serta efektivitas pengawasan dan evaluasi pengelolaan BMN oleh satuan kerja.

Pada tahun 2025, capaian dua Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, melampaui target yang ditetapkan dan memberi kontribusi signifikan pada peningkatan efektivitas tata kelola aset negara.

2. IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan - Realisasi 101,39% (Target 100%)

Capaian sebesar 101,39% menunjukkan bahwa program pensertipikatan tanah BMN di wilayah Kanwil DJKN SJB telah berjalan efektif dan bahkan melampaui target.

Pensertipikatan tanah BMN merupakan langkah penting untuk:

- memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset negara,
- melindungi BMN dari potensi sengketa dan penyerobotan,
- mendukung pemanfaatan BMN secara optimal,
- meningkatkan kualitas data aset dalam SIMAK-BMN dan sistem DJKN lainnya.

Meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaksiapan satker dalam menentukan batas tanah dan kelengkapan dokumen, capaian tahun 2025 menunjukkan efektivitas koordinasi antara KPKNL, Kanwil, satuan kerja, dan Kementerian ATR/BPN.

3. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN - Realisasi 120,00% (Target 100%)

Evaluasi kinerja BMN bertujuan menilai tingkat pemanfaatan, kondisi fisik, optimalisasi, serta kesesuaian fungsi aset dalam mendukung layanan pemerintah.

Dengan capaian 120,00%, indikator ini menunjukkan:

- meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN di satuan kerja,
- peningkatan kedisiplinan satker dalam menyampaikan data dan dokumentasi,
- semakin banyaknya BMN yang ditinjau pemanfaatannya,
- perbaikan kualitas rekomendasi pemanfaatan, pengamanan, maupun penatausahaan BMN,
- meningkatnya kesadaran satker akan pentingnya tata kelola aset yang akuntabel.

Capaian ini selaras dengan indikator terkait lainnya, terutama kualitas layanan penilaian yang mencapai 162,63%, yang memperkuat efektivitas evaluasi dan pemanfaatan BMN.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian IKU “Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif” menunjukkan bahwa Kanwil DJKN SJB berhasil:

- mencapai 101,39% untuk pensertipikatan tanah BMN,
- mencapai 120,00% untuk evaluasi kinerja BMN,
- menjaga efektivitas monitoring, administrasi, dan pemanfaatan aset negara di wilayah kerja.

Kinerja ini memperkuat tata kelola BMN secara menyeluruh dan berkontribusi langsung pada nilai Proses Internal serta pencapaian NKO Tahun 2025 sebesar 115,13 (kategori Sangat Baik).

V. Capaian IKU Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|---|--------|-----------|---------|
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 156,96 % | 120,00 |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 113,84 % | 120,00 |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80,00% | 108,70 % | 120,00 |

Tabel 5.6 Capaian IKU Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

1. IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara Realisasi: 156,96% | Target: 100%. Capaian 156,96% mencerminkan efektivitas yang sangat tinggi dalam penyelesaian berkas kasus piutang negara, jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Hasil ini menunjukkan bahwa:

- proses penagihan, penetapan, dan penyelesaian piutang berjalan sangat optimal;
- koordinasi antara KPKNL dan instansi penyerah piutang meningkat;
- proses monitoring, pemanggilan, dan verifikasi berkas dilakukan lebih efektif;
- hambatan struktural seperti debitur tidak ditemukan dapat ditekan melalui strategi penyelesaian yang lebih adaptif.

Capaian ini merupakan salah satu indikator dengan performa tertinggi dalam Proses Internal tahun 2025.

2. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Realisasi: 113,84% | Target: 70%. Kualitas layanan penilaian mencapai 113,84%, meningkat jauh di atas target minimal 70%.

Capaian ini menggambarkan:

- meningkatnya kompetensi teknis penilai pemerintah (didukung IKU Customer 91,33%),
- ketepatan waktu penyelesaian permohonan penilaian,
- kualitas rekomendasi nilai wajar yang lebih akurat,
- meningkatnya pemanfaatan hasil penilaian oleh satuan kerja dan instansi pemohon,
- meningkatnya permintaan penilaian untuk pemanfaatan BMN, lelang, dan penghapusan.

Peningkatan kualitas layanan penilaian ini berdampak langsung pada optimalisasi pengelolaan BMN dan mendukung kontribusi PNBP.

3. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi: 108,70% | Target: 80%. Produktivitas lelang mencapai 108,70%, melebihi target 80% yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang sepanjang tahun 2025 berlangsung sangat aktif dan responsif, ditandai dengan:

- meningkatnya jumlah permohonan lelang dari instansi pemerintah, BUMN, perbankan, dan masyarakat;
- keberhasilan pelaksanaan berbagai kategori lelang, termasuk lelang eksekusi dan non-eksekusi sukarela;
- penguatan sistem layanan digital seperti e-Lelang;
- meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang DJKN.

Meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan pencatatan pokok lelang pada Dropbox, produktivitas lelang tetap tinggi dan berkontribusi kuat pada peningkatan PNBP wilayah.

Kesimpulan

Capaian seluruh IKU pada sasaran “Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif” menunjukkan bahwa Kanwil DJKN SJB mampu memberikan layanan

inti DJKN secara efektif, tepat waktu, dan sesuai standar profesionalisme tinggi. Capaian indikator yang melampaui target adalah:

- Penyelesaian Berkas Piutang Negara: 156,96%
- Kualitas Layanan Penilaian: 113,84%
- Produktivitas Lelang: 108,70%

Kinerja ini memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas proses internal organisasi dan mendukung pencapaian NKO Tahun 2025 sebesar 115,13 (Sangat Baik).

VI. Capaian IKU Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|--|--------|-----------|---------|
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| 6x-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80,00% | 100,00% | 120,00 |

Tabel 5.7 Capaian IKU Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Capaian IKU Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif (2025)

Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, tata kelola aset, serta peningkatan kompetensi SDM berlangsung secara akuntabel, efektif, dan mendukung kinerja organisasi. Capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, dengan seluruh indikator melampaui target yang ditetapkan.

Indikator-indikator ini menggambarkan kekuatan fundamental organisasi dalam hal pengelolaan anggaran, tata kelola pengadaan, dan peningkatan kualitas pegawai, yang merupakan fondasi pencapaian sasaran kinerja DJKN secara keseluruhan.

1. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran - Realisasi 120,00 (Target 100,00)

Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKKA) mencapai 120,00, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Kanwil

DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah dilakukan secara optimal, efisien, dan akuntabel.

Capaian ini mencerminkan:

- perencanaan anggaran yang efektif,
- realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran,
- minimnya deviasi antara perencanaan dan realisasi,
- pelaksanaan anggaran yang mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kinerja anggaran yang optimal mendukung kelancaran seluruh layanan pengelolaan BMN, piutang negara, dan lelang sepanjang tahun 2025.

2. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa - Realisasi 110,00 (Target 100,00), Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 110,00, melebihi target 100,00.

Hal ini menunjukkan:

- proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip value for money,
- pelaksanaan pengadaan yang lebih akurat, cepat, dan efisien,
- meningkatnya kualitas perencanaan dan pemetaan kebutuhan barang/jasa,
- meningkatnya integritas dan transparansi dalam proses pengadaan.

Capaian ini memperkuat akuntabilitas organisasi dan mendukung tertib mekanisme pemanfaatan BMN serta operasional KPKNL.

3. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai - Realisasi 100% (Target 80%)

IKU Pengembangan Kompetensi Pegawai mencapai 100%, melampaui target 80%, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas pegawai dilakukan secara maksimal sepanjang tahun 2025.

Capaian ini mengindikasikan:

- seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan, workshop, bimtek, atau sertifikasi sesuai kebutuhan jabatan,
- adanya perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur melalui Peta Kompetensi dan IDP (Individual Development Plan),

- meningkatnya kompetensi pegawai dalam mendukung layanan penilaian, piutang negara, dan lelang,
- berkembangnya budaya kerja adaptif dan profesional di seluruh unit kerja.

Pencapaian ini juga selaras dengan capaian IKU lain, seperti Kualitas Layanan Penilaian (113,84%) dan kompetensi penilai pemerintah (91,33%), yang menunjukkan dampak nyata peningkatan SDM terhadap kualitas layanan DJKN.

Kesimpulan

Capaian IKU “Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif” menunjukkan bahwa fondasi tata kelola organisasi Kanwil DJKN SJB pada tahun 2025 sangat kuat dan berjalan efektif. Hal ini tercermin dari:

- 120,00 untuk Indeks Kualitas Kinerja Anggaran,
- 110,00 untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa,
- 100% untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Kinerja ini memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai Perspektif Learning & Growth sebesar 117,59, serta mendukung pencapaian NKO Tahun 2025 sebesar 115,13, kategori Sangat Baik.

VII. Capaian IKU Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|-------|--|--------|-----------|---------|
| 7a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3,55 | 6,57 | 120,00 |
| 7b-N | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100,00 | 112,25 | 112,25 |

Tabel 5.8 Capaian IKU Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Capaian IKU Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif. Sasaran strategis “Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif” menggambarkan kemampuan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam memastikan penyebaran informasi yang akurat kepada publik serta penanganan permasalahan hukum secara cepat dan profesional. Pada tahun 2025, sasaran strategis ini mencapai nilai 116,13, menunjukkan performa yang sangat baik dan kontribusi signifikan terhadap capaian NKO Kanwil DJKN SJB secara keseluruhan.

1. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Realisasi: 6,57 | Target: 3,55 (120%). Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan memperoleh nilai 6,57, melampaui target 3,55, atau setara dengan capaian 120%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan fungsi komunikasi publik di lingkungan Kanwil DJKN SJB telah berjalan secara efektif, ditandai dengan:

- peningkatan kualitas diseminasi informasi mengenai layanan BMN, piutang negara, dan lelang;
- konsistensi penyampaian pesan organisasi melalui berbagai kanal internal dan eksternal;
- peningkatan intensitas edukasi publik, termasuk UMKM dan instansi pemerintah;
- peningkatan kehadiran DJKN pada media sosial dan media pemberitaan;
- meningkatnya persepsi positif publik, sejalan dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (95,48) dan Indeks Efektivitas Edukasi & Komunikasi (94,29).

Capaian tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa aktivitas kehumasan mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan citra positif DJKN di wilayah SJB.

2. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Realisasi: 112,25 | Target: 100,00 (112,25%). Indeks Penanganan Permasalahan Hukum mencapai 112,25, melampaui target 100,00.

Capaian ini mencerminkan:

- penyelesaian permohonan pendampingan hukum secara akurat dan tepat waktu;
- peningkatan kualitas koordinasi dengan Biro Hukum, KPKNL, dan instansi penegak hukum;
- efektivitas pemberian pendapat hukum administratif yang dibutuhkan satuan kerja dalam menangani pemanfaatan BMN, pelaksanaan lelang, penghapusan BMN, serta kasus piutang negara;
- mitigasi risiko hukum pada proses layanan DJKN;
- meningkatnya kualitas dokumentasi dan pelaporan permasalahan hukum.

Kinerja yang tinggi pada indikator ini mendukung perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi proses pengelolaan kekayaan negara, sehingga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian IKU pada sasaran strategis “Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif” Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik, ditandai dengan:

- Capaian 120% pada Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, dan
- Capaian 112,25% pada Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.

Kinerja ini menghasilkan nilai sasaran strategis sebesar 116,13, sekaligus berkontribusi pada pencapaian NKO Kanwil DJKN SJB Tahun 2025 sebesar 115,13 (kategori Sangat Baik). Capaian ini membuktikan bahwa fungsi komunikasi publik dan penanganan hukum telah dijalankan secara efektif dan mendukung keberhasilan layanan DJKN di seluruh wilayah.

VIII. Capaian IKU Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|------|--|--------|-----------|---------|
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 80,00 | 96,49 | 120,00 |

Tabel 5.9 Capaian IKU Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sasaran strategis “Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif” merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas organisasi, konsistensi pencapaian kinerja, dan keberlanjutan tata kelola di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Sasaran ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan sesuai ketentuan, risiko dapat diidentifikasi sejak dini, dan tindak pengendalian dijalankan secara efektif. Pada tahun 2025, sasaran ini memperoleh nilai 120,00, menunjukkan performa yang sangat baik dan kontribusi strategis terhadap pencapaian NKO Kanwil DJKN SJB secara keseluruhan.

3. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Realisasi 96,49 | Target 80,00 | Capaian 120,00%. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan ukuran efektivitas organisasi dalam mengimplementasikan siklus pengelolaan risiko, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, hingga pemantauan risiko, serta keselarasan antara risiko dan pencapaian kinerja. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN SJB mencatat nilai 96,49, melampaui target 80,00, dengan capaian yang dinilai sebesar 120,00%.

Capaian ini menunjukkan bahwa:

- proses manajemen risiko telah berjalan sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan perencanaan kinerja;
- risiko-risiko utama dalam layanan BMN, piutang negara, dan lelang dapat diidentifikasi lebih cepat;
- efektivitas mitigasi risiko meningkat, ditandai dengan minimnya deviasi pada target kinerja utama;
- mekanisme pengawasan internal semakin kuat melalui implementasi pengendalian yang konsisten;
- tindak lanjut atas temuan pengawasan internal menunjukkan tren penyelesaian yang baik.

Peningkatan kualitas manajemen risiko ini turut menjadi faktor pendukung keberhasilan berbagai IKU proses internal dan layanan DJKN yang mencapai capaian di atas target pada tahun berjalan.

Capaian IKU pada sasaran strategis “Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif” tahun 2025 menunjukkan bahwa Kanwil DJKN SJB telah berhasil:

- memastikan tata kelola pengendalian internal berjalan efektif,
- meningkatkan kualitas siklus manajemen risiko,
- menjaga konsistensi pencapaian target kinerja melalui mitigasi dan pemantauan risiko yang lebih kuat.

Realisasi 96,49 (120,00%) menjadikan sasaran ini meraih nilai 120,00, sekaligus memperkuat pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 115,13, kategori Sangat Baik.

IX. Analisis GEDSI-AKPM terhadap Pencapaian IKU Tahun 2025

Pencapaian IKU Tahun 2025 telah mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui peningkatan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat layanan DJKN. Dari sisi akses, pemanfaatan e-Auction (lelang elektronik) dan ketersediaan sarana prasarana inklusif—antara lain ruang laktasi, toilet disabilitas, loket/ruang tunggu prioritas,

parkir prioritas, dan ramp akses—telah mempermudah perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dan lelang. Kondisi ini mendukung capaian IKU terkait lelang dan kepuasan layanan, yang pada 2025 menunjukkan kinerja sangat baik.

- a. Dari aspek kontrol, struktur pengambil keputusan masih didominasi laki-laki pada level manajerial, sehingga ruang pengaruh perempuan dalam perumusan kebijakan dan prioritas layanan masih perlu diperkuat. Meskipun demikian, pembentukan Tim dan PIC Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi mekanisme kelembagaan untuk mendorong kebijakan dan layanan yang lebih responsif GEDSI. Penguatan representasi perempuan pada jabatan strategis diharapkan berdampak positif terhadap kualitas proses internal dan daya respons layanan.
- b. Pada aspek partisipasi, DJKN telah memfasilitasi keterlibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), webinar layanan, serta kegiatan PUG. Namun, pencatatan data partisipasi terpilah (gender, disabilitas, kelompok rentan) masih terbatas dan belum mencakup seluruh survei serta layanan inti. Penguatan partisipasi yang terdokumentasi secara sistematis diperlukan agar kontribusinya terhadap capaian IKU dapat diukur lebih akurat.
- c. Dari sisi manfaat, capaian IKU 3a-N (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) sebesar 95,48 menunjukkan bahwa layanan DJKN dirasakan berkualitas oleh mayoritas pengguna. Untuk memastikan manfaat yang benar-benar inklusif, hasil survei kepuasan perlu ditindaklanjuti dengan penyajian data terpilah. Selain itu, program berbasis analisis gender, seperti dukungan UMKM melalui pendekatan GAP, menunjukkan potensi manfaat ekonomi yang lebih merata, khususnya bagi pelaku usaha perempuan, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi aset, peningkatan penerimaan, dan keberlanjutan kinerja DJKN.

X. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mengelola pagu setelah buka blokir sebesar Rp2.413.643.000 dengan realisasi Rp2.402.298.696 atau tingkat penyerapan 99,53%, menyisakan sisa anggaran Rp11.344.304; Outstanding realisasi tercatat 0. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai Perjanjian Kinerja.

Rincian per bagian/bidang

(dalam ribuan)

| | Pagu | Realisasi | Serapan | Sisa Anggaran |
|-----------|-------------|-------------|---------|---------------|
| UMUM | Rp1.617.719 | Rp1.614.577 | 99,81% | Rp3.141 |
| PKN | Rp467.307 | Rp462.101 | 98,89% | Rp5.205 |
| Penilaian | Rp116.437 | Rp115.874 | 99,52% | Rp562 |
| Lelang | Rp73.917 | Rp72.988 | 98,74% | Rp928 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|---------|
| PN | Rp36.882 | Rp36.392 | 98,67% | Rp489 |
| KIHI | Rp101.381 | Rp100.364 | 99,00% | Rp1.016 |

Tabel. 6. Realisasi anggaran Secara Tematik

Secara tematik APBN, realisasi diarahkan untuk memperkuat agenda prioritas sebagai berikut:

- a. Dukungan UMKM (Kemenkeu Satu) - Dukungan Kegiatan Pokja Teknis Program UMKM Kemenkeu Sumsel dengan
 - Pagu Rp12.410.000 (ARG) Dan
 - Realisasi Rp12.260.095
 - Serapan ±98,79%
 - Mendukung keberlanjutan kegiatan pemasaran/ekshibisi UMKM binaan.
- b. Pembangunan Zona Integritas (WBBM) - Pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan
 - Pagu Rp5.320.000 Dan
 - Realisasi Rp4.742.800
 - Serapan ±89,17%
 - Sebagai dukungan penguatan tata kelola dan budaya kerja berintegritas.
- c.1. Kehumasan & Edukasi Publik - Kehumasan
 - Pagu Rp15.318.000;
 - Realisasi Rp15.173.600) dan
- c.2. Pembinaan/Edukasi Publik
 - Pagu Rp13.293.000;
 - Realisasi Rp13.183.500
 - Menopang transparansi, edukasi layanan, dan efektivitas komunikasi publik Kanwil.
- c.3. Layanan Bantuan Hukum dan Kepatuhan Internal -
 - e.1. Layanan Bantuan Hukum
 - Pagu Rp31.894.421 terealisasi dan
 - e.2. Rekomendasi Kepatuhan Internal
 - Pagu Rp26.900.951 terealisasi,
 - Untuk menjaga kepastian hukum dan penguatan pengendalian internal sepanjang tahun berjalan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan yang mendukung capaian kinerja organisasi. Tingkat serapan yang tinggi, ditopang oleh pelaksanaan kegiatan strategis seperti Layanan Bantuan Hukum dengan realisasi sebesar Rp31.894.421 serta Rekomendasi Kepatuhan Internal dengan realisasi Rp26.900.951, menggambarkan komitmen Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dalam memastikan kepastian hukum, penguatan pengendalian internal, dan pelayanan publik yang akuntabel sepanjang tahun berjalan. Dengan capaian

tersebut, diharapkan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi kinerja organisasi.

Dengan serapan nyaris optimal dan fokus pembiayaan pada operasional inti (BMN, Lelang, Penilaian, Piutang Negara) serta enablers (hukum, kepatuhan, kehumasan, edukasi publik), pengelolaan anggaran tahun 2025 terbukti selaras dengan dokumen PK dan isu tematik APBN, sekaligus menunjang efektivitas pelaksanaan layanan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus refleksi atas capaian kinerja yang telah diukur secara akuntabel berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029, serta Rencana Kerja Tahun 2025. Sepanjang tahun berjalan, pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil DJKN SJB menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,13 berdasarkan hasil pengukuran dalam Kertas Kerja NKO 2025. Capaian ini diperkuat oleh sejumlah indikator utama yang melampaui target, termasuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 95,48 yang menandai meningkatnya kepercayaan publik terhadap kualitas layanan DJKN di wilayah SJB.

Seluruh perspektif kinerja—Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth—menunjukkan capaian di atas target, termasuk kinerja optimal pada pengelolaan BMN, piutang negara, penilaian, dan pelaksanaan lelang. Kinerja unggul tersebut antara lain tercermin pada Persentase Realisasi Pokok Lelang (120,77%), Produktivitas Lelang (108,70%-135,87% pra-cap), Penyelesaian BKPN (156,96%), serta Penurunan Saldo Piutang Negara (178,26% pra-cap) yang menjadi salah satu indikator dengan capaian tertinggi di tahun 2025.

Dari aspek pengelolaan keuangan, Kanwil DJKN SJB mampu mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran dengan serapan 99,53% dari total pagu Rp2.413.643.000, yang menunjukkan efektivitas dukungan sumber daya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Beberapa kegiatan strategis seperti Layanan Bantuan Hukum dengan realisasi Rp31.894.421 serta Rekomendasi Kepatuhan Internal dengan realisasi Rp26.900.951 turut memperkuat kepastian hukum dan pengendalian internal sepanjang tahun berjalan.

Selain itu, prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) telah diintegrasikan dalam pelaksanaan layanan, khususnya melalui perluasan akses e-Auction, penyediaan sarana layanan inklusif, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik dan edukasi layanan. Penerapan ini berkontribusi pada meningkatnya kualitas layanan serta memperkuat relevansi DJKN bagi seluruh kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menegaskan kesiapan organisasi dalam menjawab tantangan strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Meskipun terdapat sejumlah isu dan hambatan yang

memerlukan tindak lanjut, seperti peningkatan kualitas data BMN, percepatan tindak lanjut pemanfaatan BMN, penguatan basis data piutang negara, dan optimalisasi literasi publik mengenai lelang, Kanwil DJKN SJB berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan proses bisnis pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan selesainya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dokumen ini dapat menjadi media evaluasi, sumber pembelajaran, dan landasan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Semoga kinerja yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-13/KN/2025

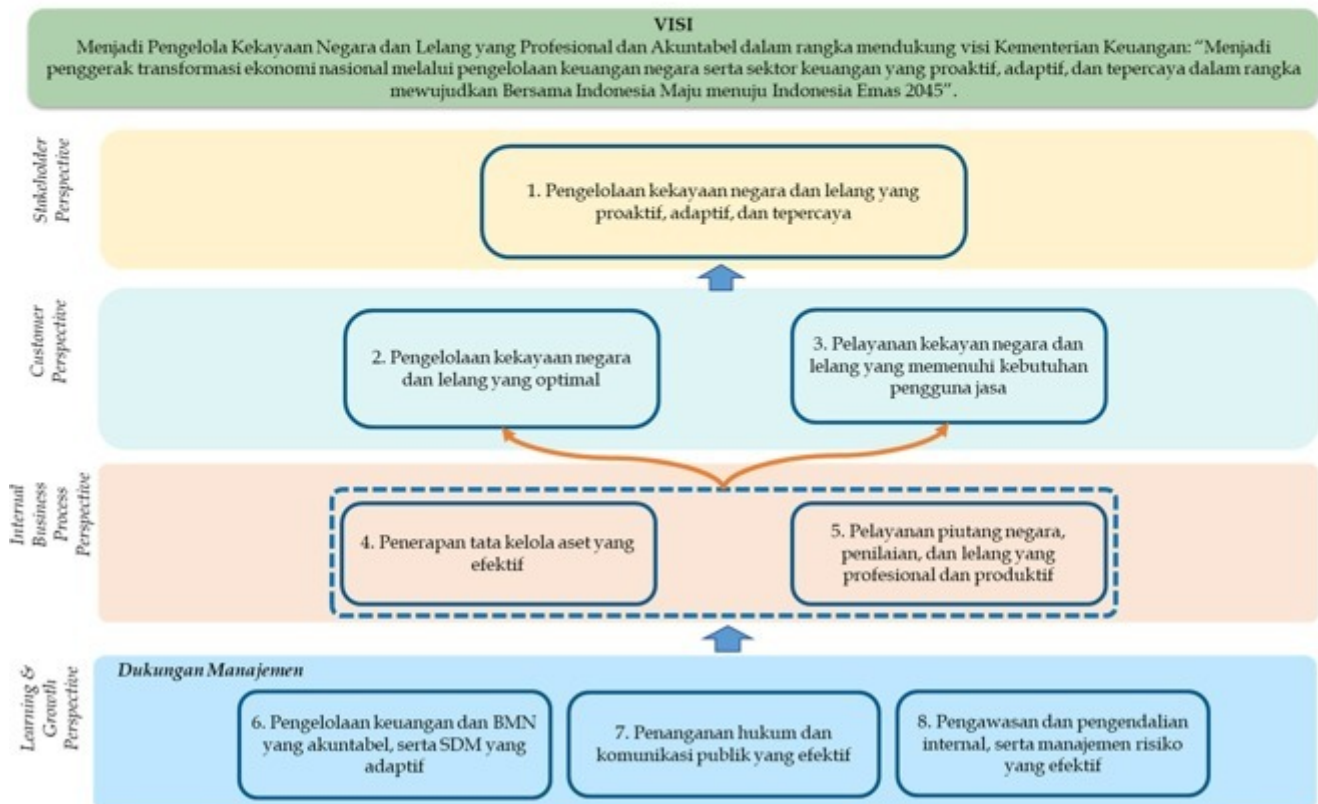
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|--|--------------------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 1a-CP | Indeks integritas | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp92,0 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp1,9 T) |
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp4,2 M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| | | 3b-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3c-N | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | 70% |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4b-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 |
| | | 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3.55 |
| | | 7b-N | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 |

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rp996,331,000



Kegiatan

| | | | |
|----|----|---|---------------|
| 1. | 1. | Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp156,718,000 |
| 2. | 2. | Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp338,678,000 |
| 3. | 3. | Pengelolaan Aset | Rp489,087,000 |
| 4. | 4. | Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp11,848,000 |

Program:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dukungan Manajemen | Rp6,669,862,000 |
|--------------------|-----------------|

Kegiatan

| | | | |
|----|----|--|-----------------|
| 1. | 1. | Legislasi dan Ligitasi | Rp33,451,000 |
| 2. | 2. | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp6,489,585,000 |
| 3. | 3. | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp98,142,000 |
| 4. | 4. | Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan | Rp48,684,000 |

Internal

Kota Palembang, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| Kode SS/IKU | SS/IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp92,0 M) |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1,9 T) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp4,2 M) |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | | | | | | | |
| 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3b-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3c-N | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | | | | | | | |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | | | | | | | |



| Kode SS/IKU | SS / IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 7a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 7b-N | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | | | | | | | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Kota Palembang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN
BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

| No. | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----------|--------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | Waktu | Kegiatan | Output | | | |
| | | | | | | | | | |

Kota Palembang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan
Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| NAMA | Ferdinan Lengkong | | NAMA | Rionald Silaban |
| NIP | 19661212 199103 1 001 | | NIP | 19660423 199010 1 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya (IV/d) | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama (IV/e) |
| JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung | | JABATAN | Direktur Jenderal Kekayaan Negara |
| UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung | | UNIT KERJA | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | Indeks integritas | 100 | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% (Rp92,0 M) | Penerima Layanan |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi pokok lelang | 100% (Rp1,9 T) | Penerima Layanan |
| | | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% (Rp4,2 M) | Penerima Layanan |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | Penerima Layanan |
| | | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | Penerima Layanan |

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



| | | | | |
|-------------|--|--|------|----------------------------------|
| | kebutuhan pengguna jasa | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | 70% | Penerima Layanan |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100% | Proses Bisnis |
| | | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | Proses Bisnis |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | Proses Bisnis |
| | | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | Proses Bisnis |
| | | Persentase produktivitas lelang | 80% | Proses Bisnis |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3.55 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



Kota Palembang, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong
19661212 199103 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------|------|--------|------|--------------------|
| 1. | 149 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp92,0 M) |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1,9 T) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp4,2 M) |
| 3a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3b-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |



| | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 3c-N | Tingkat kompetensi penilai pemerintah | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 4a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 5% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 4b-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | 15% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 40% | 40% | 70% | 70% | 80% | 80% |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| 7a-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 7b-N | Indeks penanganan permasalahan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Palembang, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ferdinan Lengkong

19661212 199103 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Jakarta, 17 November 2025

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Saldo Piutang Negara | | | | | | | | | Piutang Negara | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

Jakarta, 17 November 2025

Menyetujui,
Pejabat Penilai Kinerja

Pejabat yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



Laporan Satuan Kerja (Satker)

Nama Satker : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Pimpinan Satker : Ferdinan Lengkong
 Alamat Satker : Gedung Keuangan Negara Lantai 3, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4, Palembang
 No. Telp & Fax Satker : 0711362132 /
 PIC PUG : Nilasari Fitriani
 No. HP & Email PIC PUG : 085763866061 / nilasari.fitriani@kemenkeu.go.id

1. Komitmen Pimpinan

1. Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Dokumen Resmi

| No. | Bentuk Komitmen | Bentuk Dokumen | Narasi | Data Dukung |
|-----|---|------------------------|--|----------------------|
| 1. | Rencana Kerja Agen Perubahan | Rencana Kerja (Renja) | Rencana Kerja Agen Perubahan dalam rangk | 1-1-622810686620.pdf |
| 2. | Pembentukan Tim Kerja Implementasi Pengarusut | Keputusan, Peraturan | Wujud komitmen pimpinan dalam bentuk pe | 1-1-7035916a562.pdf |
| 3. | Rencana Kerja Tim WBBM Tahun 2025 | Rencana Kerja (Renja) | Wujud komitmen pimpinan dalam bentuk pe | 1-1-96e4e04c103c.pdf |

2. Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Kegiatan

| No. | Bentuk Kegiatan | Bentuk Dokumen | Narasi | Data Dukung |
|-----|---|-------------------------|--|---------------------|
| 1. | Melaksanakan implementasi PUG melalui inovasi | Bentuk Kegiatan Lainnya | Melaksanakan implementasi PUG melalui in | 1-2-49ce6097084.pdf |

2. Kebijakan yang Responsif Gender

1. Kebijakan Responsif Gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan

| No. | Bentuk Kebijakan | Bentuk Dokumen | Narasi | Data Dukung |
|-----|--|---|---|------------------------|
| 1. | Kebijakan pelaksanaan e-Auction | Peraturan Menteri Keuangan | Kebijakan pelaksanaan e-Auction, dimana | 2-2-3-f8d77cac4160.pdf |
| 2. | Penetapan Standar Pelayanan pada Kanwil DJKN | Keputusan/Surat Edaran/ Nota Dinas Pimp | Penetapan Standar Pelayanan pada Kanwil | 1-2-3-59176343ee7.pdf |

2. Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana

| No. | Sarana dan Prasarana Responsif Gender | Ada | Tidak |
|-----|---|-----|-------|
| 1. | Ruang laktasi | v | |
| 2. | Ruang bermain anak | v | |
| 3. | Tempat Penitipan Anak (daycare) | v | |
| 4. | Toilet terpisah laki-laki dan perempuan | v | |
| 5. | Toilet bagi penyandang disabilitas | v | |
| 6. | Ruang tunggu dan loket layanan prioritas | v | |
| 7. | Parkir prioritas | v | |
| 8. | Lift yang ramah bagi Penyandang Disabilitas (bagi Satker yang memiliki bangunan lebih dari li | | v |
| 9. | Ram akses masuk bangunan/gedung bagi penyandang disabilitas | v | |

3. Komunikasi Informasi dan Edukasi

| No. | Komunikasi Informasi dan Edukasi | Ada | Tidak |
|-----|---|-----|-------|
| 1. | Advokasi PUG bagi Pimpinan | | v |
| 2. | Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Pelatihan PUG yang diselenggarakan oleh Tim PUG | v | |
| 3. | Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop / Pelatihan PUG yang diselenggarakan selain dari Tim | | v |
| 4. | Sosialisasi/In House Training/Gugus Kendali Mutu yang diselenggarakan oleh internal Satker | | v |
| 5. | Media cetak dan elektronik kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti standi | v | |
| 6. | Buku Panduan, Buku Saku, dan buku sejenis terkait acuan PUG | v | |

4. Kebijakan Lainnya

| No. | Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Inovasi Responsif Gender Lainnya | Narasi |
|-----|---|--|
| 1. | Forum Konsultasi Publik | Partisipasi masyarakat dituangkan dalam Forum Konsultasi Publik Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung |

3. Kelembagaan PUG (Tim/Kelompok Kerja)

| No. | Dasar Pembentukan | Bentuk Kelembagaan | Narasi | Data Dukung |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. | Pembentukan Tim Kerja Implementasi Pengarusutama | Tim PUG | Telah dibentuk Tim Kerja Implementasi Pen | 3-0-95ee6fc36798.pdf |

4. Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)

1. Sumber Daya Manusia (Level Unit)

| No. | Jabatan | L | P |
|-----|--------------------|----|----|
| 1. | Eselon II | 1 | 0 |
| 2. | Eselon III | 5 | 1 |
| 3. | Eselon IV | 12 | 3 |
| 4. | Fungsional Terentu | 2 | 0 |
| 5. | Fungsional Umum | 10 | 10 |

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | L | P |
|-----|------------|----|---|
| 1. | S2 | 10 | 4 |
| 2. | SI/DIV | 18 | 4 |
| 3. | DIII | 0 | 5 |
| 4. | DI/SMU | 2 | 1 |

3. Anggaran Responsif Gender (ARG)

| No. | Output/Kincian Output | ARG |
|-----|---|---------------|
| 1. | Kerumahainggaan, Dukungan Kegiatan Pokja tekt | Rp.12.410.000 |

5. Data Terpilih (Menurut Jenis Kelamin)

| No. | Nama Kegiatan | Sertifikat | | Non Sertifikat | |
|-----|--|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Laki - Laki | Perempuan | Laki - Laki | Perempuan |
| 1. | Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Pelatihan PUG yang diselenggarakan oleh Tim PUG | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop / Pelatihan PUG yang diselenggarakan selain dari Tim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Advokasi PUG bagi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sosialisasi/In House Training/Gugus Kendali Mutu yang diselenggarakan oleh internal Satker | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Alat Analisis Gender (Gender Analysis Pathways/GAP)

| No. | Kebijakan/Program yang dianalisis | Program/ Dukungan Manajemen; Kegiatan; Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; R |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Data Pembuka Wawasan | Jumlah pekerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2 |
| | Faktor Kesenjangan | Dibandingkan dengan pekerja laki-laki, pekerja perempuan lebih banyak terserap di indus |
| | Sebab Kesenjangan Internal | Kebijakan yang telah ada terkait UMKM belum menyentuh seluruh lapisan pelaku UMKM |
| | Sebab Kesenjangan External | Selain memproduksi barang, sebagian besar IMK menial langsung produksnya ke konsum |
| | Reformasi Tujuan | Memperudah akses pemasaran bagi pelaku UMKM yang selama ini tidak terfasilitasi pe |
| | Rencana Aksi | Pelaksanaan Sosialisasi tentang UMKM; Pelaksanaan UMKM Expo Kemenkeu Satu Sam |
| | Data Dasar | Acara UMKM Expo Pasar Bedug Ramadhan 1446 H dan UMKM Expo Peringatan HORI |
| | Indikator Kinerja | Mendukung sinergi Kemenkeu Satu dengan ikut mememarkan peringatan Pasa Bedug 1 |
| | Output | Kerumahainggaan; Dukungan Kegiatan Pokja teknis program UMKM Kemenkeu Sumsel |
| | Arg | Rp.12.410.000 |

7. Partisipasi Masyarakat

| No. | Nama Kegiatan | Bentuk Partisipasi | Narasi |
|-----|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Forum Konsultasi Publik | Bentuk Partisipasi Lainnya | Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Webinar "Lelang Tuntas, Layanan Berintegritas" Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 |